

**ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR
INTERNAL PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



OLEH :

Nama : Nurul Fadhillah Nasution
NPM : 2205170222
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : NURUL FADHILLAH NASUTION
NPM : 2205170222
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DELI SERDANG

Dinyatakan (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

IRFAN, S.E., M.M., Ph.D

Penguji II

MUHAMMAD FAHMI PANJAITAN, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA

Pembimbing

SUKMA LESMANA, M.Si., Ph.D

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. RADIMAN, S.E., M.Si

Sekretaris

Dr. HASRUDY TANJUNG, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Lengkap : Nurul Fadhillah Nasution
N.P.M : 2205170222
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan
Judul Penelitian : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 26 Februari 2026

Pembimbing

Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis

Mhd. Shareza Hafiz., S.E, M.Acc





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nurul Fadhillah Nasution
NPM : 2205170222
Nama Dosen Pembimbing : Sukma Lesmana, M.Si., Ph.D
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan
Judul Penelitian : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan
Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan
Kabupaten Deli serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3	Rajjabasan Skripsi harus ada	8/1-26	✓
Bab 4	- Analisis penelitian yang lebih tentang jawaban responden - Pembahasan yang lebih jelas dan mendalam - Solusi harus dikemukakan	20/1-26	✓
Bab 5		11/2-26	✓
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc per bahasan di sidang	11/2-26	✓

Medan, 13 Februari 2026

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.)

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

(Sukma Lesmana, M.Si., Ph.D)



UMSU
Pegawai Cerdas | Terpercaya

Menumbuhkembangkan kearifan lokal agar disebarkan ke seluruh Indonesia

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024

Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id/> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Fadhillah Nasution
NPM : 2205170222
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan
Judul Penelitian : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal
Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 26 Februari 2026
Saya yang Menyatakan



Nurul Fadhillah Nasution

ABSTRAK

ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nurul Fadhillah Nasution

Program Studi Akuntansi

Email: nurulfadhillahnasution@gmail.com

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran Inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta masih adanya hambatan dalam menjaga konsistensi kebijakan akuntansi dan keterbandingan laporan keuangan antar periode. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling dengan responden seluruh auditor yang relevan dalam fungsi pengawasan laporan keuangan pemerintahan. Data diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan skala likert dengan perhitungan nilai rata-rata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan berada pada kategori sangat baik. Namun demikian, masih terdapat hambatan pada aspek konsistensi kebijakan akuntansi dan keterbandingan laporan keuangan antarperiode yang dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman, perubahan regulasi, serta keterbatasan pendampingan teknis. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan peran Inspektorat agar kualitas laporan keuangan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Auditor Internal, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE INSPECTORATE AS THE GOVERNMENT'S INTERNAL AUDITOR IN IMPROVING THE QUALITY OF THE FINANCIAL REPORTS OF THE GOVERNMENT OF DELI SERDANG REGENCY

Nurul Fadhillah Nasution

Accounting Study Program

Email: nurulfadhillahnasution@gmail.com

The problem in this study is the suboptimal role of the Inspectorate in improving the quality of regional government financial reports and the persistence of obstacles in maintaining consistency of accounting policies and comparability of financial reports between periods. This study aims to determine the role of the Inspectorate as an internal auditor in improving the quality of financial reports of the Deli Serdang Regency Government and identify the inhibiting factors encountered in the implementation. The type of research used is descriptive qualitative. The research sample used purposive sampling with respondents from all auditors relevant to the function of overseeing government financial reports. Data were obtained through questionnaires and analyzed using a Likert scale with the calculation of the average value. The results of this study indicate that the role of the Inspectorate in improving the quality of financial reports is in the very good category. However, there are still obstacles in the aspect of consistency of accounting policies and comparability of financial reports between periods influenced by differences in understanding, regulatory changes, and limited technical assistance. This indicates the need to strengthen the role of the Inspectorate so that the quality of financial reports can be more optimal and sustainable.

Keywords : Internal Auditor, Quality of financial reports

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia, serta kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan izin dan rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul: “ **Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang** ”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, atas segala cinta, doa, nasihat, serta dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan tugas akhir ini. Semangat, ketulusan, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan doa sehing-

ga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Radiman, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Nabilla Dwi Agintha S.E., M.Sc** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si** selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Bapak **Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D** selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan selama proses penyusunan Tugas Akhir.
9. Bapak **H. Edwin Nasution, SH., M.Si, CGCAE.** selaku Inspektur Kabupaten Deli Serdang dan Ibu **Febrina Astried Sembiring, SE. M.Si** selalu pemberi izin serta seluruh staff pegawai yang telah membantu serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melakukan kegiatan penelitian di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

10. Teman – teman seperjuangan khususnya **Ester**, **Nabila**, dan **Alifia** yang telah menjadi sahabat suka duka penulis sejak semester 1 hingga sekarang. Serta seluruh teman 7E Akuntansi Pagi dan Teman – teman sejurusan yang telah memberi semangat, dukungan serta saran – sarannya.
11. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas keberanian untuk bertahan dan menyelesaikan semua proses ini hingga akhir. Proses yang dilalui tidak selalu berjalan mudah, namun setiap tantangan telah menjadi bagian dari pembelajaran yang berharga. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa segala usaha dan kesabaran tidak pernah sia-sia.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum mencapai kesempurnaan. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima masukan dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Diharapkan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah, serta menjadi bagian dari sumbangsih ilmu pengetahuan yang diridhai oleh Allah SWT. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan, 2026

Penulis

Nurul Fadhilah Nasution

2205170222

DAFTAR ISI

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	i
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Batasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Audit Internal	14
2.1.1.1 Pengertian Audit Internal	14
2.1.1.2 Peran Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintah.....	15
2.1.1.3 Standar Profesional Auditor Internal	18
2.1.1.4 Tahap-tahap Audit Internal.....	19
2.1.2 Jaminan Kualitas (Quality Assurance)	22
2.1.2.1 Standar Audit Yang di Terapkan	22
2.1.2.2 Independensi Auditor	23
2.1.2.3 Pengujian Kepatuhan dan Substantif	25
2.1.3 Konsultasi Jaminan (Consulting Assurance)	25
2.1.3.1 Peran Inspektorat Auditor Internal Dalam Konsultasi Jaminan	26
2.1.4 Indikator Kualitas Audit Pemerintah	27
2.1.4.1 <i>Review</i> atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Berpikir Konseptual	36
2.3.1 Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	36
2.3.2 Audit Internal	37

2.3.3 Penjamin Mutu (Quality Assurance)	37
2.3.4 Pemberi Masukan (Consulting Assurance).....	38
2.3.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Definisi Operasional.....	42
3.2.1 Peranan Inspektorat	42
3.2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	42
3.3 Tempat dan waktu Penelitian	43
3.3.1 Tempat Penelitian.....	43
3.3.2 Waktu Penelitian	43
3.4 Populasi dan Sampel	44
3.4.1 Populasi Penelitian	44
3.4.2 Sampel Penelitian	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	50
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	52
4.1 Deskripsi Data.....	52
4.1.1 Gambaran Umum Responden.....	52
4.1.2 Deskripsi Instrumen Penelitian.....	54
4.2 Analisis Data	54
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	54
4.2.2 Peranan Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang	56
4.2.3 Faktor Penghambat Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Pemerintah kabupaten Deli Serdang.....	61
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
5.3 Keterbatasan Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Rekomendasi BPK dengan Laporan Hasil Reviu Inspektorat atas LKPD Kabupaten Deli Serdang.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 1 Tabel Indikator Peranan Inspektorat	42
Tabel 3.2 2 Tabel Indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah	42
Tabel 3.3 Tabel Jadwal Penelitian	43
Tabel 3.4 Kisi-kisi Pernyataan (wawancara konfirmasi)	47
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	51
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	51
Tabel 4.4 Hasil Penelitian Peranan Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	54
Tabel 4.5 Hasil Penelitian Faktor Penghambat Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan	55
Tabel 4.6 Tanggapan Tambahan Responden Terkait Peranan Inspektorat.....	59
Tabel 4.7 Tanggapan Tambahan Responden Terkait Faktor Penghambat	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram LKPD Kabupaten Deli Serdang	2
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran dokumentasi kegiatan penyerahan tautan penelitian.....78
2. Lampiran Kuesioner Penelitian.....79

3. Lampiran rekapitulasi hasil kuesioner responden.....	85
4. Lampiran data LKPD PEMKAB Deli Serdang Tahun 2017-2024.....	98
5. Lampiran Data LHP atas Laporan Keuangan dari BPK Tahun 2022-2024.....	99
6. Lampiran Data LHR atas Laporan Keuangan dari Inspektorat Tahun 2022-2024.....	105
7. Lembar persetujuan.....	108
8. Surat keterangan dosen pembimbing.....	111
9. Pernyataan keaslian skripsi.....	117
10. Berita acara bimbingan proposal.....	118
11. Berita acara seminar proposal.....	119
12. Daftar riwayat hidup.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

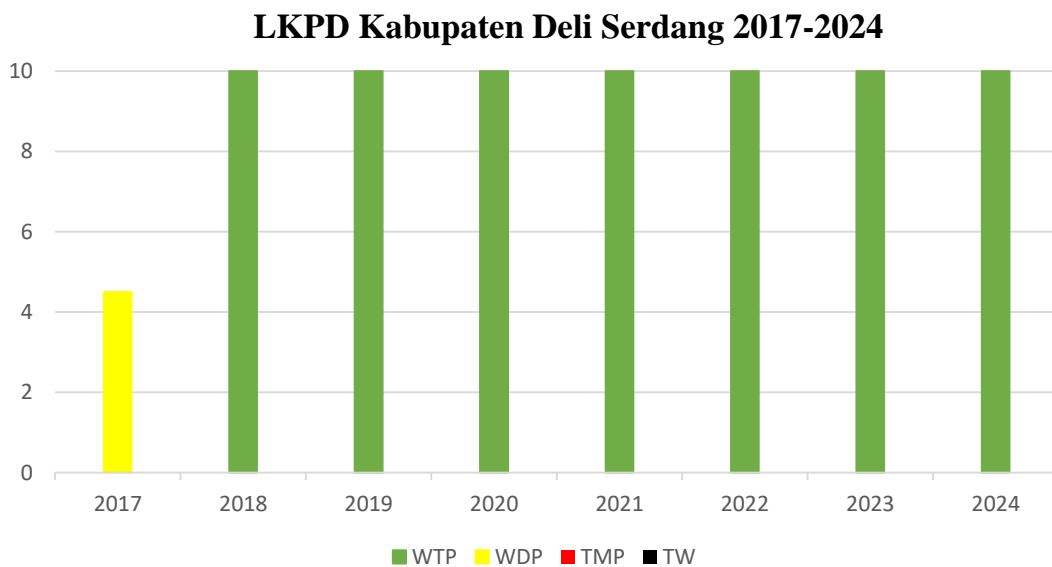
1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kepada masyarakat. Pemerintah di tingkat daerah dituntut untuk menyediakan laporan keuangan yang berkualitas, jelas, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan pemerintah, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan (Mardiasmo (2018)). Dalam upaya menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, keberadaan sistem pengendalian internal serta fungsi audit internal merupakan bagian yang sangat penting. Berdasarkan Teori Akuntabilitas, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjelaskan pengelolaan keuangan kepada masyarakat (Riyadi (2020)).

Audit internal di pemerintahan khususnya di Inspektorat, bertugas untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, aparat pengawas di dalam pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian yang cukup mengenai ketaatan, efisiensi, serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2021) dari mengungkapkan bahwa peran Inspektorat yang efek-

tif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi, *review*, dan

bimbingan teknis kepada perangkat daerah. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Inspektorat berfungsi tidak hanya sebagai pengawas, melainkan juga sebagai jaminan mutu (Quality Assurance) dan penasihat (Consultant) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1.1 Diagram LKPD Kabupaten Deli Serdang

Sumber: Data Sekunder

Tingkat Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dilihat dari opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Opini (WDP) ini mengindikasikan adanya kelemahan material dalam penyajian laporan keuangan yang memerlukan perbaikan serius, setelah itu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2024. Namun, opini WTP tidak langsung

menunjukkan bahwa semua aspek pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. BPK dalam LHP masih menemukan sejumlah kelemahan yang signifikan pada sistem pengendalian internal serta pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat sebagai auditor internal perlu diperkuat untuk mengurangi temuan yang sama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Temuan BPK menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas peran Inspektorat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, sebagai berikut:

1. Temuan Tahun 2022

- 1) Data pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Sarang Burung Walet belum lengkap dan akurat
- 2) Kekurangan volume 16 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) sebesar Rp804.409.754,62
- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) belum tertib.

2. Temuan Tahun 2023

- 1) Penganggaran pendapatan pajak tidak terukur secara rasional serta terdapat defisit riil melebihi ketentuan yang mengakibatkan membebani keuangan daerah tahun berikutnya sebesar Rp193.598.418.289.

- 2) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp608.350.412,00
- 3) Pengelolaan kas pada 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum tertib yang mengakibatkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai.

3. Temuan Tahun 2024

- 1) Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum memadai yang mengakibatkan kehilangan kesempatan penerimaan pajak daerah dari BPHTB sebesar Rp5.430.642.654. dan potensi kekurangan penerimaan minimal atas PBJT restoran, PBJT hotel, PBJT kesenian dan hiburan serta Pajak MBLB tahun pajak 2024 sebesar Rp352.150.733.
- 2) Kekurangan volume dan mutu atas 20 paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp777.565.518,72 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp836.761.013.
- 3) Kebijakan akuntansi yang memuat kebijakan berdasarkan PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi belum ditetapkan dan pemanfaatan BMD belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan entitas pelaporan dan akuntansi belum mempunyai pedoman yang rinci dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan tentang

Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Berdasarkan COSO Framework (2013), kelemahan dalam pengendalian internal bisa timbul dari

lemahnya lingkungan pengendalian, minimnya aktivitas pengawasan, serta rendahnya penilaian risiko. Siregar, Simanjuntak, & Lubis (2025) menyatakan bahwa: “ketidakefektifan pengendalian internal akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan, ketidaktepatan informasi akuntansi, serta meningkatnya potensi terjadinya penyimpangan.”. Selain itu, kurangnya pengawasan dari Inspektorat terhadap pelaksanaan belanja modal dan pendapatan daerah mengakibatkan kesalahan dalam penganggaran, kekurangan volume, serta pembayaran yang berlebihan.

Menurut Pakpahan, Murwaningsari, & Mayangsari (2022), kelemahan dalam sistem pengendalian intern akan berpengaruh langsung terhadap menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan temuan mereka, terdapat beberapa dampak/konsekuensi yang dapat muncul akibat lemahnya pengawasan internal, yaitu:

1. Ketidakakuratan dalam pencatatan transaksi, sehingga informasi yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
2. Terbukanya peluang terjadinya kesalahan pada proses pelaksanaan anggaran, seperti kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, atau potensi kerugian daerah.
3. Perencanaan pendapatan daerah menjadi tidak efektif, misalnya proyeksi target pajak yang tidak rasional sehingga menimbulkan defisit anggaran yang berdampak pada tahun berikutnya.

4. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah rentan tidak sesuai ketentuan, termasuk ketidaktepatan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun nonfisik yang berakhir pada terjadinya pemborosan anggaran.
5. Kualitas laporan keuangan secara keseluruhan menurun karena informasi yang disajikan tidak lagi dapat menjadi dasar pertimbangan yang andal bagi pengambilan keputusan.
6. Tingkat risiko penyimpangan juga meningkat, sebab lemahnya kontrol internal mengurangi kemampuan sistem untuk mendeteksi ketidakpatuhan atau potensi fraud pada tahap awal.

Setelah menguraikan hasil temuan BPK mengenai kelemahan pengendalian internal di Kabupaten Deli Serdang, sangat penting untuk membandingkan rekomendasi dari BPK dengan catatan hasil *review* dari Inspektorat. BPK menyampaikan saran perbaikan melalui audit eksternal, sedangkan Inspektorat memberikan catatan hasil *review* sebagai bagian dari pengawasan internal di pemerintah daerah. Perbandingan ini berguna untuk mengetahui apakah isu yang diidentifikasi oleh BPK juga terdeteksi oleh Inspektorat, apakah ada perbedaan dalam fokus pengawasan, serta apakah kelemahan yang sama terus muncul setiap tahun. Oleh karena itu, tabel berikut disediakan untuk memberikan pemahaman mengenai kesesuaian dan perbedaan perhatian antara BPK dan Inspektorat dalam usaha meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Deli Serdang. Penyajian ini juga berguna untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan (GAP) dalam pengawasan yang masih ada dan memperkuat urgensi penelitian ini.

Tabel 1.1

Tabel Perbandingan Rekomendasi BPK dengan Laporan Hasil Reviu Inspektorat atas LKPD Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Rekomendasi BPK (Eksternal)	Catatan Reviu Inspektorat (Internal)
2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban status lahan sekolah dan puskesmas yang berada di kawasan hutan. 2. Pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) oleh Sekda/TGR. 3. Optimalisasi pendapatan daerah melalui: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemeriksaan PBB-P2 atas 28 bidang KIM. b) Pendataan usaha sarang burung walet. c) Koordinasi dengan Karantina Pertanian mengenai data produksi walet. 4. Pengawasan pekerjaan fisik: <ol style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kecermatan PPK/PPTK/pengawas. b) Pemrosesan kelebihan pembayaran Rp37 juta. c) Pemrosesan potensi kelebihan pembayaran Rp668 juta. 5. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku pejabat penatausahaan barang untuk mengkaji alternatif perolehan aset tanah sekolah dan puskesmas pada tanah eks HGU PTPN II dan PT KAI, atau mengoordinasikan penganggaran ganti rugi secara bertahap 6. Sertifikasi tanah sekolah & puskesmas melalui koordinasi Dinas Pendidikan/Kesehatan dengan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat selisih pendapatan transfer pusat di LRA antara saldo Audited 2021 dengan saldo 2021 yang disajikan pada laporan keuangan tahun 2022 2. Terdapat selisih penyajian aset tetap 3. Terdapat penyajian pada pos KDP yang belum di dukung addendum sebesar Rp 4.610.486.371 4. Terdapat selisih belanja modal aset lainnya dengan aset tidak berwujud senilai Rp 1.135.077.600 5. Terdapat kesalahan pencatatan mutasi utang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. 6. Terdapat selisih antara beban amortisasi dengan penambahan akumulasi penyusutan neraca.
2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penganggaran pajak daerah harus lebih rasional berdasarkan analisis capaian sebelumnya. 2. Penyusunan anggaran pajak oleh Bapenda harus lebih cermat. 3. Pemrosesan kelebihan pembayaran Sekretariat DPRD sebesar Rp608 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kekurangan penyajian nilai persediaan sebesar Rp8.389.838.000 2. Terdapat penyajian nilai aset tanah sebesar Rp14.598.308.000,00 tidak dilengkapi dengan dokumen sumber yang me-

	<p>juta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penguatan elektronifikasi transaksi (TP2DD). 5. Pengusulan perjanjian kerja sama rekening PAUD & kesetaraan dengan Bank Sumut. 6. Penyetoran PPN dan PPh oleh bendahara sekolah sebesar Rp487 juta. 	<p>madai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Terdapat Kelebihan penyajian utang belanja sebesar Rp3.339.385.680,50 4. Terdapat Kekurangan penyajian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp3.061.489.496,00. 5. Terdapat kelebihan penyajian Beban LO sebesar Rp12.908.106.599,50
2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemrosesan kekurangan penerimaan pajak: <ol style="list-style-type: none"> a) BPHTB Rp5,4 miliar. b) Pajak restoran, hotel, hiburan, MBLB minimal Rp352 juta. 2. Pemrosesan permasalahan proyek fisik: <ol style="list-style-type: none"> a) Kekurangan volume & mutu Rp777 juta. b) Potensi kelebihan pembayaran Rp836 juta. 3. Pemutakhiran kebijakan akuntansi sesuai SAP dan pengaturan pemanfaatan BMD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kekurangan penyajian Piutang lainnya sebesar Rp2.051.540.000. 2. Terdapat kekurangan penyajian nilai persediaan sebesar Rp8.648.420.000. 3. Terdapat kelebihan penyajian utang belanja sebesar Rp1.241.794.053. 4. Terdapat kekurangan penyajian ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp89.378.929.652.

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan analisis perbandingan antara rekomendasi dari BPK dan hasil *review* Inspektorat, dapat dilihat bahwa keduanya berada pada area yang sama memperlihatkan kelemahan dalam pengendalian internal di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, terutama dalam hal pengelolaan aset, pengeluaran modal, serta pencatatan dan rekonsiliasi laporan keuangan. Namun, temuan dari Inspektorat lebih condong untuk menyoroti ketidakakuratan dalam penyajian dan kesalahan dalam pencatatan saat menyusun LKPD. Sementara itu, rekomendasi dari BPK lebih menekankan pada tindakan perbaikan yang segera, termasuk pengembalian

kelebihan pembayaran, penagihan atas kekurangan penerimaan, dan peningkatan pengelolaan di beberapa OPD tertentu. Analisis ini menunjukkan adanya kesenjangan (GAP) antara hasil *review* Inspektorat yang bersifat administratif akuntansi dan rekomendasi dari BPK yang lebih mengarah pada tindakan konkret, sehingga kesenjangan antara fungsi pengawasan internal dan capaian perbaikan yang diharapkan. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan efektivitas Inspektorat dalam melakukan reuiu, pemantauan, dan memastikan tindak lanjut perbaikan benar-benar dilaksanakan oleh OPD terkait. Sejalan dengan temuan Hutabarat & Lubis (2021) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan internal, terutama pada tahapan pencatatan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP), pencapaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan sistem pengendalian internal yang ada. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai kelemahan yang masih diidentifikasi oleh BPK, seperti kekurangan dalam volume pekerjaan, pembayaran yang berlebihan, isu dalam perencanaan atau ketidaktepatan penganggaran, serta pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal. Situasi ini menunjukkan terdapatnya perbedaan antara kualitas penyajian laporan keuangan dan efisiensi sistem pengawasan internal. Dalam hal ini, peran Inspektorat menjadi sangat penting, karena sebagai auditor internal untuk pemerintah daerah, Inspektorat seharusnya mampu mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi temuan-temuan tersebut sebelum audit eksternal dilakukan. Dengan demikian, keberadaan temuan yang sama yang muncul di tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa pengawasan internal belum berfungsi

dengan baik, sehingga perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk menganalisis secara lebih mendalam peranan Inspektorat sebagai auditor internal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Peranan ini mencakup fungsi evaluasi, rekomendasi, dan pengawasan terhadap laporan keuangan daerah. Diharapkan dengan peranan yang optimal, Inspektorat dapat memastikan laporan keuangan disajikan dengan kualitas yang baik dan wajar, sehingga mampu melewati proses pemeriksaan BPK secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: “Analisis Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Meskipun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, masih terdapat temuan-temuan audit yang mengindikasikan perlunya analisis lebih lanjut terhadap peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2. Terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang memengaruhi peranan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan fungsi pengawasan internalnya.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjadi fokus pada penelitian, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penulis hanya akan berfokus pada analisis peranan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang . Peranan dibatasi pada fungsi auditor internal yang berkaitan langsung dengan kualitas laporan keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Inspektorat sebagai auditor internal untuk menjalankan fungsi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peranan instansi Badan Inspektorat sebagai auditor internal untuk menjalankan fungsi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kemanfaatan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada ilmu akuntansi pemeriksaan tentang peran Inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang.
2. Kemanfaatan Praktis
 - a. Memberikan masukan untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pengawasan.
 - b. Memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*).
 - c. Menambah literatur ilmiah terkait peran auditor internal pemerintah

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal secara umum merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal organisasi yang berfungsi memastikan tercapainya tujuan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bhakti dan Widodo (2024) menjelaskan bahwa audit internal tidak hanya berperan dalam menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi, tetapi juga berfungsi untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi risiko, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, audit internal dapat dikatakan sebagai mekanisme strategis yang memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengendalian dan tata kelola yang diterapkan Bhakti *et al* (2024).

Dalam konteks pemerintahan, fungsi audit internal dijalankan oleh unit pengawasan internal seperti inspektorat yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Fakhri, Rahman, & Yuliani (2024) menegaskan bahwa inspektorat memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (fraud) melalui kegiatan pembinaan, supervisi, dan pemeriksaan berkala terhadap perangkat daerah. Fungsi ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga diarahkan untuk

memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, audit internal yang dilakukan oleh inspektorat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah Fakhri *et al* (2024).

2.1.1.2 Peran Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintah

Inspektorat di tingkat daerah merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki peran krusial dan strategis dalam ekosistem pemerintahan daerah. Institusi ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) dan bertugas memastikan akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rencana yang telah ditetapkan. Peran Inspektorat meluas dari sekadar fungsi pengawasan tradisional (audit kepatuhan) hingga fungsi modern yang bersifat konsultatif, yang mana secara esensial bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan organisasinya, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peran Inspektorat sebagai auditor internal adalah faktor penentu dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kualitas LKPD ini tidak hanya mencakup kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), namun juga efektivitas sistem pengendalian internal, yang secara keseluruhan sangat menentukan opini kewajaran yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inspektorat berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’ Kepala Daerah, yang harus memastikan semua Unit Kerja berada pada jalur yang benar, meminimalkan risiko, dan memperbaiki kelemahan sebelum diaudit oleh

pihak eksternal. Peran strategis ini, yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mencakup pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan yang harus dijalankan secara independen dan objektif.

Secara garis besar, peran Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah meliputi fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Audit Kinerja dan Kepatuhan

Inspektorat melaksanakan berbagai jenis audit, termasuk audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu (ATN), dan audit kepatuhan (ketaatan). Pelaksanaan audit ini memiliki dampak langsung pada kualitas LKPD karena bertugas memeriksa kesesuaian pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan program pembangunan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pengawasan melalui audit internal telah dilaksanakan dengan baik di Inspektorat, meskipun terdapat beberapa kendala. Audit ini memastikan bahwa transaksi dicatat secara akurat, sah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah.

2. *Review* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Fungsi reviu ini adalah salah satu peran preventif paling krusial. Inspektorat wajib melaksanakan reviu atas LKPD sebelum laporan tersebut diserahkan kepada BPK. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa LKPD telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peningkatan kualitas reviu LKPD yang dilakukan Inspektorat berkorelasi negatif dengan jumlah temuan pemeriksaan BPK Dwi Windarsih & Irwan Taufiq Ritonga (2017). Artinya, semakin baik

kualitas revidi oleh Inspektorat, semakin sedikit temuan yang dihasilkan oleh BPK, yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan (*monitoring*) terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP sendiri, guna memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti secara efektif. Selain itu, Inspektorat bertugas mengevaluasi efektivitas SPIP pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). SPIP yang efektif adalah fondasi utama bagi kualitas laporan keuangan. Peran Inspektorat dalam memonitor dan memperbaiki SPIP adalah kunci untuk mencegah berulangnya temuan, sekaligus memperkuat sistem tata kelola di lingkungan pemerintah daerah.

4. Pemberian Konsultasi (*Consulting Services*)

Peran ini mencerminkan evolusi auditor internal dari *watchdog* menjadi *partner*. Inspektorat bertindak sebagai konsultan internal yang memberikan saran, asistensi, dan pembinaan kepada manajemen (SKPD) terkait perbaikan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Layanan konsultasi ini bersifat proaktif dan membantu manajemen dalam mengidentifikasi serta memperbaiki kelemahan operasional dan pengendalian sebelum menjadi masalah yang signifikan, sehingga meningkatkan nilai tambah bagi organisasi secara keseluruhan.

5. Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dan Penguatan Integritas

Inspektorat turut serta dalam upaya pencegahan praktik kecurangan (*fraud*) dan korupsi melalui audit investigatif (jika diperlukan) dan penguatan integritas di lingkungan pemerintahan daerah. Peran ini ditekankan untuk menciptakan iklim kerja yang transparan dan akuntabel. Dengan berfokus pada pencegahan, Inspektorat membantu memelihara aset negara dan meminimalkan kerugian keuangan daerah, yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang andal dan terpercaya.

2.1.1.3 Standar Profesional Auditor Internal

Standar Profesi Audit Internal merupakan kerangka kerja yang harus dipatuhi oleh auditor internal dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Kepatuhan terhadap standar ini adalah indikator kunci dari profesionalisme dan kualitas audit yang dihasilkan. Standar profesi ini berfungsi untuk memberikan pedoman dasar dalam pelaksanaan fungsi audit internal, meningkatkan nilai tambah auditor, dan menegaskan peran pentingnya dalam tata kelola organisasi.

Standar Audit Internal yang berlaku secara internasional diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA), yang dikenal sebagai International Professional Practices Framework (IPPF). Kerangka ini mencakup *Definition of Internal Auditing*, *Code of Ethics*, dan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (Standar). Standar ini secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Standar Atribut (*Attribute Standards*)

Berfokus pada karakteristik entitas dan individu yang melakukan kegiatan audit internal, seperti independensi, objektivitas, kemahiran, dan kecermatan profesional.

2. Standar Kinerja (*Performance Standards*)

Menggambarkan sifat kegiatan audit internal dan memberikan kriteria untuk mengukur kinerja, seperti pengelolaan fungsi audit internal, sifat pekerjaan, perencanaan perikatan, hingga komunikasi dan tindak lanjut.

Penerapan standar profesional ini diyakini memiliki korelasi yang erat dengan kualitas audit internal. Menurut Ratri & Bernawati (2020), kepatuhan dalam penerapan Standar Atribut dan Standar Kinerja audit internal adalah fitur penting yang dapat menunjukkan kualitas audit internal. Kepatuhan auditor internal terhadap standar profesional dapat memberikan manfaat bagi organisasi, tidak hanya untuk mencapai tujuan, tetapi juga dapat mencerminkan reputasi yang baik dan meningkatkan kualitas audit internal Ratri & Bernawati (2020). Oleh karena itu, bagi Inspektorat sebagai APIP, kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku (misalnya Standar Audit APIP) adalah prasyarat untuk memastikan bahwa pengawasan internal yang dilakukan memiliki kredibilitas dan dampak positif yang maksimal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.1.1.4 Tahap-tahap Audit Internal

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang didirikan dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi sebagai suatu

jasa bagi organisasi. Untuk melaksanakan tugas ini secara efektif, terdapat tahap-tahap pelaksanaan audit internal yang sistematis.

Menurut Tunggal (2012, hal. 120), pelaksanaan audit internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang sistematis. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1) Audit Perencanaan dan Analisis resiko (Audit Planning and Risk Analysis)

Dalam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa yang seharusnya dilakukan, dimana, dan kapan dilakukan. Adapun poin penting dalam tahap ini adalah menganalisis penilaian audit, mengumpulkan fakta tentang wilayah audit, analisis risiko kinerja, mengidentifikasi bukti audit, menuliskan secara detail objek yang diaudit, mengembangkan program kerja audit, menentukan jadwal serta membagi pekerjaan kepada staf.

2) Survei pendahuluan (Preliminary Survey)

Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap wilayah audit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang diaudit. Poin penting dalam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi, menelusuri wilayah aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan dokumentasi, dan menggunakan hasil survey secara efektif.

3) Audit Kerja Lapangan (Audit Field Work)

Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang

wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.

4) Temuan Audit dan Rekomendasi (udit Finding dan Recommendation)

Adanya temuan merupakan pernyataan dari kondisi yang menyatakan suatu fakta. Temuan audit yang baik tergantung pada kualitas kerja lapangan seorang auditor dan dilengkapi dengan kertas kerja. Terdapat tiga poin penting dalam tahap ini:

- a. mengembangkan temuan audit
- b. mendokumentasikan temuan audit
- c. dan melakukan penutupan (closing)

5) Pelaporan (Reporting)

Reporting merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses audit internal. Banyak yang mampu menulis sebuah report, tetapi tidak satupun yang mampu menulisnya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap ini:

- a. outline report
- b. menulis draft awal
- c. mengedit draft
- d. dan menuliskan final report

6) Menindaklanjuti (Follow Up)

Dalam tahap ini dilakukan pengoreksian terhadap kontrol yang lemah yang telah diidentifikasi oleh internal audit dan dilaporkan kepada manajemen. Ada dua hal penting pada tahap ini: kebutuhan akan follow up atau tindak lanjut dan melakukan tindak lanjut terhadap audit.

2.1.2 Jaminan Kualitas (Quality Assurance)

Jaminan Kualitas (Quality Assurance) dalam konteks pemeriksaan dan audit internal pemerintah adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang ditujukan untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan standar profesional, memadai dari segi metode, serta metodologinya dapat diandalkan, dan dapat menghasilkan bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Jaminan mutu mencakup pengaturan sistem kontrol kualitas dalam organisasi audit (termasuk standar teknis, pengawasan, tinjauan terhadap pekerjaan, pelatihan auditor, dan mekanisme umpan balik) sehingga hasil audit seperti laporan pemeriksaan dan rekomendasi dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Konsep ini sangat penting karena kualitas audit internal pemerintah berpengaruh langsung terhadap kepercayaan laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik Rajafi *et al* (2024).

Penelitian Lesmana (2011) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi yang dijalankan secara efektif menjadi salah satu aspek yang menentukan jaminan kualitas dalam kegiatan audit karena dapat meminimalkan risiko kesalahan serta memastikan kesesuaian proses audit dengan standar.

2.1.2.1 Standar Audit Yang di Terapkan

Proses penjaminan kualitas audit di instansi pemerintah daerah melibatkan penerapan standar audit yang disepakati, sebagai dasar untuk menjamin bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara yang sistematis, cukup, dan relevan. Standar ini mencakup :

1. Pedoman profesional bagi auditor
2. Standar audit internal pemerintah (APIP)

3. Aturan pengendalian internal pemerintah
4. Ketentuan akuntansi untuk pemerintahan (SAP)

Dengan penerapan standar audit yang sesuai, lembaga auditor internal atau inspektorat dapat melaksanakan serangkaian aktivitas mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan pengujian kepatuhan dan substansi, hingga pelaporan hasil secara efisien. Sebagai contoh Lubis & Meutia (2019) menunjukkan bahwa keterampilan auditor dan etika profesi yang tinggi, yang merupakan bagian dari standar profesional audit, memberi dampak signifikan terhadap kualitas audit di inspektorat pemerintah daerah. Standar audit juga menjamin bahwa audit memiliki karakteristik seperti independensi (kebebasan), objektivitas, bukti yang memadai, dokumentasi yang cukup, serta pelaporan yang jelas. Dengan kata lain, standar audit bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi merupakan alat penting untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2.2 Independensi Auditor

Independensi auditor internal (atau auditor yang beroperasi di bawah unit pengawasan internal seperti inspektorat) adalah elemen penting dalam jaminan kualitas. Auditor yang memiliki independensi baik secara struktural maupun psikologis dapat memberikan opini dan temuan tanpa adanya pengaruh dari pihak yang diaudit. Dengan terjaganya independensi, rekomendasi hasil audit lebih cenderung untuk diimplementasikan, dan hasil audit biasanya berdampak positif dalam perbaikan sistem dan laporan keuangan. Astuty (2016) menekankan bahwa fungsi auditor internal dan sistem kontrol internal dalam pengelolaan pemerintahan yang baik sangat terkait dengan sejauh mana auditor memiliki kebebasan dan adanya mekanisme pengawasan yang hendaknya mendukungnya.

Dalam konteks pemerintahan daerah, apabila auditor internal atau inspektorat tidak memiliki independensinya (misalnya akibat tekanan politik lokal atau hubungan kepegawaian dengan unit yang diperiksa), maka efektivitas audit akan menurun temuan audit mungkin tidak menyeluruh dan tindak lanjut rekomendasi bisa terhambat.

Beberapa faktor yang mendukung independensi auditor internal, yaitu :

1. Kompetensi Auditor Internal

Auditor yang memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional yang memadai mampu menjalankan audit secara objektif. Kompetensi ini mencakup kemampuan teknis audit, pemahaman standar, serta pengalaman yang relevan sehingga auditor dapat menilai risiko dan menemukan penyimpangan tanpa terpengaruh tekanan eksternal.

2. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Perusahaan

Kebijakan perusahaan yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan kewenangan auditor internal membantu menjaga independensi. Regulasi ini termasuk pedoman audit, kode etik, dan standar operasional yang mengatur jalannya audit internal.

3. Kebebasan dari Tekanan Manajemen

Auditor internal yang tidak mengalami campur tangan atau tekanan dari manajemen cenderung dapat membuat penilaian dan laporan audit secara objektif. Tekanan manajemen yang rendah memungkinkan auditor untuk fokus pada temuan audit dan rekomendasi yang profesional.

4. Dukungan Pimpinan

Dukungan dari pimpinan dalam proses audit memperkuat posisi auditor internal. Auditor yang mendapatkan dukungan penuh dari komite audit atau pimpinan tertinggi dapat melaporkan temuan audit dengan lebih kredibel dan bebas dari intimidasi.

2.1.2.3 Pengujian Kepatuhan dan Substantif

Jaminan kualitas dalam audit dilakukan melalui pengujian yang memadai, yang mencakup pengujian kepatuhan maupun pengujian substantif. Pengujian kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa entitas telah memenuhi berbagai regulasi, standar akuntansi yang berlaku, dan prosedur pengendalian internal.

Sementara itu, pengujian substantif mencakup analisis rinci terhadap transaksi finansial, saldo rekening, serta pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menilai kewajaran penyajiannya. Dalam studi yang dilakukan oleh Hafsa *et al* (2017) terungkap bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal, termasuk sistem akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, menjadi salah satu faktor penghambat utama bagi kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

Oleh karena itu, auditor internal (inspektorat) harus memastikan bahwa prosedur pengujian dirancang dan dilaksanakan secara tepat, bukti audit diakumulasi dengan cukup, dan dokumen audit tersusun secara lengkap. Semua langkah ini merupakan bagian dari jaminan mutu audit yang pada akhirnya mendukung kualitas laporan keuangan.

2.1.3 Konsultasi Jaminan (Consulting Assurance)

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui kegiatan pengawasan, pemberian jaminan (assur-

ance), dan konsultasi (consulting). Peran assurance dilakukan dengan cara memberikan keyakinan objektif bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern berjalan efektif. Sementara itu, peran konsultasi dilakukan melalui pemberian saran, rekomendasi, serta pendampingan kepada perangkat daerah untuk memperbaiki kelemahan sistem dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Kedua peran ini menjadikan Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas yang menilai kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi manajemen dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Wicaksono (2019).

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan Inspektorat dalam menjalankan fungsi assurance dan consulting berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena mampu meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan keandalan informasi keuangan Dwiyana *et al* (2019).

Dengan demikian, implementasi peran ganda Inspektorat melalui kegiatan jaminan dan konsultasi merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

2.1.3.1 Peran Inspektorat Auditor Internal Dalam Konsultasi Jaminan

Inspektorat adalah lembaga Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas sebagai auditor internal di lingkungan pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsinya, inspektorat memiliki beberapa bentuk peran sebagai auditor internal dalam konsultasi jaminan, yaitu:

1. Audit Kinerja (Performance Audit)

Menilai apakah kegiatan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuannya agar sumber daya publik digunakan secara optimal.

2. **Audit Kepatuhan (Compliance Audit)**

Memastikan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. *Review* **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Sebelum laporan keuangan diserahkan ke BPK, Inspektorat melakukan reviu internal untuk menjamin keandalan data, ketepatan klasifikasi akun, serta penyajian yang sesuai SAP.

4. **Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Intern**

Inspektorat menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan memberikan assurance terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2.1.4 Indikator Kualitas Audit Pemerintah

Kualitas audit di tingkat pemerintah daerah dapat dinilai melalui beberapa indikator yang menggambarkan bagaimana proses audit dilaksanakan dan dampaknya terhadap laporan serta pengelolaan keuangan daerah. Indikator-indikator umum terdiri dari: opini audit dari pihak eksternal (seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi audit internal, sistem pengendalian dalam pemerintahan daerah, tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta frekuensi dan luas pengujian audit. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Meutia (2019) mengungkapkan bahwa keterampilan auditor dan etika profesional yang baik berpengaruh pada kualitas audit, yang dapat diartikan sebagai indikator bagi auditor internal.

2.1.4.1 Review atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu indikator penting untuk menilai kualitas audit pemerintah adalah seberapa efektif "tinjauan" yang dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Tinjauan ini bisa dilakukan oleh auditor internal atau inspektorat serta auditor eksternal. Aspek-aspek dari tinjauan mencakup: lingkup pemeriksaan, kualitas temuan, kecepatan dalam menindaklanjuti rekomendasi, dan pendapat auditor eksternal setelah tinjauan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ramdhansyah *et al* (2017) menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengendalian internal (yang merupakan salah satu komponen dari tinjauan) berhubungan dengan rendahnya kualitas LKPD di pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.

Secara praktis, di Kabupaten Deli Serdang, indikator tinjauan dapat diukur melalui: jumlah serta jenis temuan dari Inspektorat, persentase rekomendasi yang dilaksanakan, perubahan pendapat dari auditor eksternal dari tahun ke tahun, dan perbaikan terhadap sistem pengendalian internal serta akuntansi yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap tinjauan tersebut. Dengan cara ini, tinjauan terhadap LKPD menjadi ukuran yang penting dalam kajian Anda untuk menilai peran inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut Eka Maulana (2021), melalui studi kualitatif yang dilakukan di Kabupaten Pinrang, Inspektorat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah daerah selama tujuh tahun berturut-turut. Kontribusi ini diwujudkan melalui serangkaian fungsi, mulai dari pengawasan audit kinerja, review Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemantauan, evaluasi, hingga pembinaan dan konsultasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Menurut Kesuma Puja Lestari, Afrah Junita, & Iqlima Azhar (2023), yang melakukan penelitian kuantitatif pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Deli Serdang, ditemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Temuan ini mendukung konsistensi penerapan standar, didukung oleh SDM yang kompeten dan sistem pengendalian yang kuat, sebagai prasyarat penting dalam menghasilkan laporan yang berkualitas. Namun, hasil studi ini menunjukkan kontradiksi signifikan dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Magelang.

Menurut Sipayung (2021) “Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi”. Laporan keuangan daerah adalah suatu ringkasan dari suatu proses, pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dan publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Metode penelitian menggunakan

jenis kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian berpengaruh signifikan terhadap menjaga kualitas laporan keuangan daerah.

Selanjutnya, menurut David Efrata Tarigan, Subhilhar, & Husni Thamrin (2021), peran ganda Inspektorat ini sebagai "pengawas" dan juga "konsultan" yang proaktifurut diperkuat dalam penelitian deskriptif kualitatif mereka di Kabupaten Deli Serdang. Mereka menganalisis pelaksanaan peran dan fungsi audit internal oleh Inspektorat Daerah dan menemukan bahwa fungsi pengawasan dan audit internal telah berjalan dengan baik sesuai tugas dan kewenangannya, meskipun mereka juga mencatat adanya beberapa kendala operasional dan non-teknis dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor serta sarana prasarana

Menurut Ihsan, M.H. (2018) untuk mengetahui peranan Inspektorat Kota Prabumulih atas laporan keuangan pemerintahan daerah kota Prabumulih penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat kota Prabumulih telah berperan penting dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah kota Prabumulih yang di mana sebelumnya pemerintah daerah kota Prabumulih mendapat opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2012 dan menjadi opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2013 dengan melakukan peningkatan kerja dalam hal pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi tindak lanjut. Begitu juga dengan pelaksanaan review atas laporan keuangan yang lakukan dan ditingkatkan lebih baik dalam pelaksanaannya serta peningkatan dalam hal pembinaan atau konsultasi kepada Allah dan satuan kerja perangkat dalam pemerintahan kota Prabumulih

Menurut Fibriyanti S. Lakoro (2024), faktor internal auditor juga sangat penting, di mana kualitas audit Inspektorat dipengaruhi secara positif oleh kompetensi auditor yang memadai dalam standar akuntansi pemerintah, pengalaman kerja yang relevan, dan kondisi kerja yang memungkinkan auditor bekerja tanpa tekanan waktu yang berlebihan. Selain peran APIP secara langsung, terdapat penelitian terdahulu yang meneliti variabel-variabel struktural dan teknis yang memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Tamuntuan (2023) dengan metode kualitatif melalui observasi dan analisis data sekunder menekankan pentingnya kompetensi auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor yang baik dapat mendukung pelaksanaan audit internal, meskipun hambatan seperti keterbatasan waktu audit dan rendahnya pengetahuan auditee tetap memengaruhi efektivitasnya. Hal ini menjadi rujukan penting bagi penelitian ini untuk menilai peran Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Menurut Siti Adira *et al* (2024) studi literatur mengenai peran Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal sangat berpengaruh dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menekankan bahwa efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi faktor kunci dalam keberhasilan audit internal. Temuan ini sejalan dengan penelitian ini yang menilai bagaimana peran Inspektorat memengaruhi kualitas laporan keuangan di Kabupaten Deli Serdang.

Kewo & Rufaedahra (2024) menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit internal terhadap kualitas laporan keuangan di beberapa pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga audit internal yang optimal dapat meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan.

Menurut Romarito (2023), evaluasi pelaksanaan audit internal pada Inspektorat Kabupaten Sleman menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa pemenuhan standar audit internal pemerintah (SAIP) sudah cukup baik, sekitar 64,15%. Namun, penelitian ini menemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah personil, kemampuan auditor yang bervariasi, dan fasilitas pendukung yang belum memadai. Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah

Perbedaan hasil yang kontradiktif (terutama pada variabel Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal/SPIP) ini menciptakan *research gap* yang jelas. Meskipun terdapat konsensus di antara studi kualitatif bahwa Inspektorat memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui fungsi audit, *review*, dan konsultasi (Maulana, 2020; Tarigan *et al.*, 2021), inkonsistensi pada faktor pendukung kuantitatif menegaskan bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut mungkin bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh kondisi lokal, atau adanya variabel intervening/moderasi lain yang belum teridentifikasi. Inkon-

sistensi ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian saat ini menjadi relevan untuk menguji kembali, atau bahkan memverifikasi ulang, peran APIP (Inspektorat) dan faktor-faktor pendukungnya dalam konteks geografis dan waktu yang berbeda, guna memberikan kontribusi empiris yang lebih kokoh.

Berikut ini tabel ringkasan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Analisis Audit Internal dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eka Maulana (2020)	“Peran Inspektorat dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang”	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat berperan penting melalui pengawasan, reviu LKPD, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan/konsultasi, yang berkontribusi pada Opini WTP.
2	Kesuma Puja Lestari, Afrah	“Faktor-Faktor yang	Metode Regresi Linear	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

	Junita, & Iqlima Azhar (2023)	Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Deli Serdang)”	Berganda (Kuantitatif)	kompetensi SDM, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3	Sipayung, Y. A., & Morasa, J. (2021)	“Evaluasi audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (studi kasus pada inspektorat kota tomohon)”	Metode pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan yang efektif dan efisien dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah dengan cara membandingkan badan keuangan daerah dengan laporan keuangan daerah konsolidasi.
4	David Efrata Tarigan, Subhilhar, & Husni Thamrin (2021)	“Analisis Peran dan Fungsi Internal Audit Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Deliserdang”	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran pengawasan melalui audit internal Inspektorat telah dilaksanakan dengan baik terhadap urusan pemerintahan daerah, meskipun ada kendala dalam pelaksanaannya.
5	Ihsan, M.H. (2018)	“Analisis Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih”	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan Inspektorat Kota Prabumulih berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, terbukti dari perubahan opini Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dari WDP (2012) menjadi WTP (2013). Peningkatan peran dilakukan melalui peningkatan ker-

				ja dalam hal pelaksanaan pengawasan pemeriksaan, evaluasi tindak lanjut, peningkatan review atas laporan keuangan, dan pembinaan/konsultasi kepada audit.
6	Fibriyanti S. Lakoro (2024)	“Analisis Kualitas Audit Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo”	Metode Kualitatif Deskriptif	Kualitas audit dipengaruhi secara positif oleh kompetensi auditor, pengalaman kerja, dan tidak adanya tekanan waktu.
7	Tamuntuan, Pangkey & Kolondam (2023)	Kompetensi Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi di Kantor Inspektorat Kota Manado)	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan Kompetensi auditor internal relatif baik, namun terdapat hambatan seperti keterbatasan waktu audit dan rendahnya pengetahuan auditee yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
8	Adira, Saputri, Arnita & Mariana (2023)	Peran Inspektorat Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Literatur Riview	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat sangat penting dalam fungsi pengawasan internal untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah; efektivitas SPIP menjadi faktor kunci.
9	Kewo & Rufaedah (2024)	Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan Efektivitas Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara)	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

10	Romarito C. S. (2023)	Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal pada Inspektorat Kabupaten Sleman	Metode Kualitatif	Pemenuhan standar audit internal pemerintah (SAIP) oleh Inspektorat Kabupaten Sleman cukup baik (~64,15%), namun terdapat kendala seperti personil terbatas, kemampuan auditor, dan fasilitas yang belum memadai.
----	-----------------------	---	-------------------	---

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

2.3.1 Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang adalah badan pengawas internal di tingkat pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Sebagai auditor internal pemerintah daerah, Inspektorat bertugas untuk melakukan pengawasan, audit, evaluasi, dan pembinaan atas pelaksanaan berbagai aktivitas di seluruh perangkat daerah untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang memainkan peranan penting dalam mengevaluasi keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui audit internal yang bersifat objektif dan tidak berpihak, Inspektorat dapat memberikan saran perbaikan terkait kelemahan yang dicatat sehingga dapat mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.

2.3.2 Audit Internal

Audit internal dalam pemerintahan daerah merupakan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh unit internal pemerintahan (seperti Inspektorat/APIP) untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pengelolaan keuangan publik. Sebagaimana disebutkan, “audit internal variabelnya berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” Wiwin Aryani *et al* (2024) Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa audit internal bersama sistem pengendalian intern berperan penting dalam mewujudkan tata kelola bersih: “fungsi audit internal yang lebih matang secara signifikan mengurangi korupsi dalam pemerintah daerah” Shidqi & Arfiansyah (2025). Karena itu, dalam kerangka penelitian ini, audit internal dilihat sebagai variabel kunci yang menghubungkan fungsi pengawasan pemerintahan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

2.3.3 Penjamin Mutu (Quality Assurance)

Quality Assurance dalam konteks audit internal merupakan upaya sistematis untuk memastikan semua aktivitas audit dilakukan sesuai dengan standar profesional, prosedur, dan prinsip etika yang ada. Fungsi ini memastikan bahwa hasil dari audit dapat diandalkan, relevan, dan berguna untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, quality assurance dilaksanakan melalui pengawasan, peninjauan hasil audit, serta penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan, agar mutu laporan dan saran yang diberikan tetap konsisten dan sesuai dengan standar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

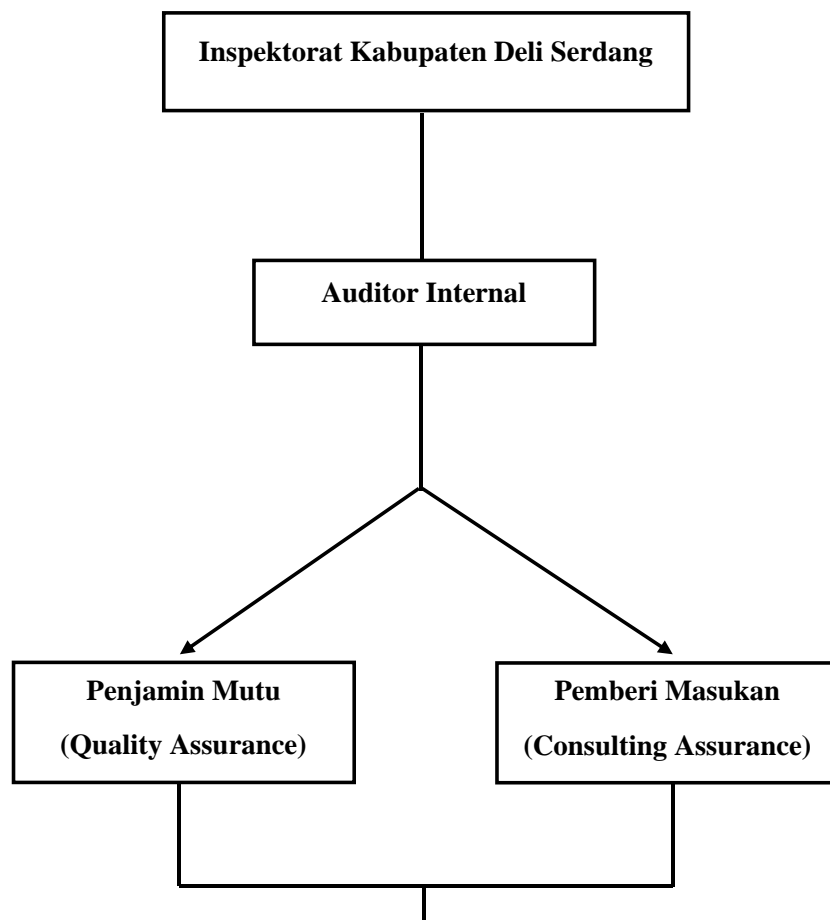
2.3.4 Pemberi Masukan (Consulting Assurance)

Selain tugas pengawasan, auditor internal juga memiliki peran sebagai penasihat atau pemberi masukan bagi pemerintah daerah. Dengan melakukan kegiatan konsultasi, Inspektorat mendukung perangkat daerah dalam mengenali risiko, memperbaiki sistem pengendalian internal, serta meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang ada. Dalam konteks Kabupaten Deli Serdang, peran ini menguatkan kolaborasi antara auditor internal dan perangkat daerah untuk membangun pengelolaan keuangan yang lebih baik serta mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan melalui saran dan pendampingan yang bersifat pencegahan.

2.3.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Rasdianto (2013)). Di Kabupaten Deli Serdang, peningkatan kualitas laporan keuangan berhubungan erat dengan efektivitas peran Inspektorat sebagai auditor internal yang melaksanakan tugas jaminan dan konsultasi. Audit internal yang dilaksanakan dengan baik akan mengoreksi kesalahan penyajian, meningkatkan keterbukaan, serta memperkuat tanggung jawab publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kerjasama antara fungsi pengawasan dan pembinaan dari Inspektorat memberikan kontribusi langsung kepada terciptanya laporan keuangan yang sah dan dapat diandalkan.

Kerangka Berpikir Konseptual mengenai Analisis peran audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual

Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Ikhsan *et al* (2014), penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial dan organisasi secara sistematis tanpa melakukan pengujian hipotesis statistik, melainkan dengan menekankan pada proses, peran, dan makna dari objek yang diteliti.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif peranan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses, interaksi, dan mekanisme audit internal serta dampaknya terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel diperlukan agar setiap variabel dalam penelitian ini dapat diukur secara jelas dan konsisten. Menurut ikhsan *et al* (2014), definisi operasional bertujuan untuk membatasi makna variabel agar sesuai dengan konteks penelitian serta memudahkan peneliti

Dalam menyusun indikator pengukuran. Dengan demikian, definisi operasional membantu peneliti menetapkan indikator, parameter, serta batasan yang jelas terhadap variabel, agar proses pengumpulan data dapat berlangsung secara objektif dan konsisten.

3.2.1 Peranan Inspektorat

Peranan inspektorat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai amanat PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman APIP. Adapun indikator dari peranan inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 1 Indikator Peranan Inspektorat

No	Indikator Peranan Inspektorat	Sumber Refrensi
1	Pelaksanaan audit pengawasan internal	Maulana (2020); Ihsan (2018); Tarigan <i>et al.</i> (2021); Situmorang (2021)
2	<i>Review</i> laporan keuangan	
3	Pemantauan tindak lanjut hasil audit	
4	Pembinaan dan konsultasi	
5	Efektivitas rekomendasi audit	

3.2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam SAP (PP No. 71 Tahun 2010).

Menurut SAP, laporan keuangan yang baik harus memenuhi karakteristik, adapun indikator dari kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Indikator Peranan Inspektorat	Sumber Refrensi
1	Relavan	PP 71/2010 (SAP); Lestari <i>et al.</i> (2023)
2	Andal	
3	Dapat dipahami	
4	Dapat dibandingkan	

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2019, hal. 126); Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh auditor pada Badan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, yaitu auditor yang bertugas melaksanakan audit, reuiu, dan evaluasi. Berdasarkan informasi dari inspektorat, jumlah auditor yang bertugas pada unit audit umum adalah 36 auditor, sedangkan auditor yang berada pada bidang PPUPD merupakan bagian berbeda dan tidak semua terlibat langsung dalam reuiu LKPD.

Oleh karena itu, populasi penelitian hanya difokuskan pada 36 auditor yang relevan dengan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan daerah.

3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019, hal. 128); Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh populasi karena jumlah populasi auditor yang relevan hanya 36 auditor, maka penelitian ini menggunakan teknik total sampling.

Menurut Sugiyono (2019, hal. 128); teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan sumber data dengan memperhatikan ciri-ciri dan penyebaran populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability Sampling dengan Sampling Jenuh, yaitu teknik pengambilan seluruh anggota populasi sebagai sampel karena jumlah populasinya relatif kecil. Menurut Sugiyono (2019:132) teknik sampling

jenuh adalah teknik yang digunakan berdasarkan semua populasi dijadikan sampel.

Adapun kriteria informan yang dijadikan sampel antara lain :

1. Auditor internal yang aktif melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pejabat di Inspektorat yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
3. Pihak yang mengetahui atau berinteraksi langsung dengan proses audit.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini meliputi beberapa metode, yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Deli Serdang dan Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Pemkab Deli Serdang. Dokumentasi ini digunakan sebagai data sekunder untuk mendukung hasil wawancara dan observasi.

2. Wawancara Konfirmasi

Penulis menggunakan wawancara konfirmasi dengan pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur kepada informan. Teknik ini bertujuan untuk mengonfirmasi data tentang peranan inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Jawaban informan diberikan menggunakan skala Likert 1–5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik deskriptif. Mes-

kipun pertanyaan bersifat terarah, informan tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atau alasan tambahan guna memperjelas jawaban yang disampaikan.

Untuk menilai jawaban responden mengenai setiap indikator dari variabel yang diteliti, penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima penilaian. Skala Likert dipilih karena dapat menyajikan sikap, pendapat, dan pandangan responden dengan cara yang lebih sistematis dan terukur terkait fenomena yang dipelajari.

Setiap pernyataan di kuesioner dilengkapi dengan lima pilihan jawaban, di mana skor 1 berarti sangat tidak setuju, skor 2 berarti tidak setuju, skor 3 berarti netral, skor 4 berarti setuju, dan skor 5 berarti sangat setuju. Skor-skor ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai statistik deskriptif yang menjadi dasar analisis data dalam penelitian ini.

Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata dari setiap indikator dan variabel yang diteliti, digunakan rumus rata-rata (mean) sebagai berikut (Sugiyono, 2019) :

$$RS = (m-n)/k$$

Dimana :

RS = Rentang skala

N = Skor minimal

M = Skor maksimal

K = Jumlah kategori

Berdasarkan skala likert 1-5, maka diperoleh :

$$RS = (5-1)/5 = 0,80$$

Dengan demikian, kategori penilaian jawaban responden dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1,00-1,80 : Sangat tidak setuju

1,81-2,60 : Tidak setuju

2,61-3,40 : Netral

3,41-4,20 : Setuju

4,21-5,00 : Sangat setuju

Hasil dari perhitungan rata-rata ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan jawaban dari responden pada setiap variabel yang diteliti. Selanjutnya, nilai rata-rata yang didapat diinterpretasikan berdasarkan kecenderungan skala jawaban responden, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk memberikan gambaran tentang keadaan setiap variabel yang dianalisis.

Adapun kisi-kisi wawancara konfirmasi yang ingin penulis ajukan dalam pengumpulan data :

Tabel 3.4

Kisi-kisi Pernyataan (wawancara konfirmasi)

1. Daftar pernyataan

Indikator Peranan Inspektorat

No	Indikator	Pernyataan	Jawaban				
			STS	TS	N	S	SS
1.	Pelaksanaan audit pengawasan internal	Auditor internal melaksanakan audit pengawasan internal atas penyusunan LKPD sesuai dengan standar audit pemerintah.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
2.		Auditor internal melaksanakan audit pengawasan secara independen dan ob-					

		jektif dalam proses penyusunan LKPD.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
3.	Reviu laporan keuangan	Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan sebelum LKPD disampaikan ke BPK.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
4.		Reviu yang dilakukan inspektorat membantu OPD memperbaiki kesalahan sebelum LKPD diaudit oleh BPK.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
5.	Pemantauan tindak lanjut hasil audit	Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang telah diberikan kepada OPD.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
6.		OPD menindaklanjuti rekomendasi hasil audit inspektorat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
7.	Pembinaan dan konsultasi	Inspektorat memberikan pembinaan dan konsultasi kepada OPD dalam penyusunan dan penyajian LKPD.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
8.		Pembinaan dan konsultasi yang diberikan inspektorat membantu OPD memahami standar penyusunan LKPD.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					

9.	Efektivitas rekomendasi audit	Rekomendasi audit Inspektorat efektif dalam memperbaiki kelemahan penyusunan laporan keuangan daerah.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
10.		Rekomendasi audit inspektorat mendorong peningkatan kepatuhan OPD terhadap standar akuntansi pemerintahan.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					

2. Daftar Pernyataan

Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Indikator	Pernyataan	Jawaban				
			STS	TS	N	S	SS
1.	Relavan	Informasi yang disajikan dalam LKPD telah relevan dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
2.		LKPD menyajikan informasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
3,	Andal	LKPD disusun secara andal dan bebas dari kesalahan material.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
4.		Data dan informasi dalam LKPD didukung oleh bukti yang memadai dan					

		dapat dipercaya.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
5.	Dapat dipahami	Informasi dalam LKPD mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
6.		Penyajian LKPD menggunakan istilah dan format yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
7.	Dapat dibandingkan	LKPD dapat dibandingkan antarperiode untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
8.		Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam LKPD konsisten antarperiode.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis fenomena peran Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang secara sistematis, faktual, dan akurat. Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data yang dilakukan dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan melalui rata-rata (Mean), Maksimum, Minimum, dan Standar deviasi selama periode pengamatan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.
2. Menganalisis peranan Inspektorat untuk menjalankan fungsi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang.
3. Menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Deli serdang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang yang melibatkan auditor internal sebagai responden. Gambaran umum responden disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, dan jabatan. Karakteristik ini penting untuk mengetahui latar belakang responden yang berperan dalam memberikan penilaian terhadap peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

A. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	24	66,7%
2	Perempuan	12	33,3%
Total		36	100%

Berdasarkan tabel 4.1, komposisi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih dominan dibandingkan responden perempuan. Hal ini mencerminkan kondisi umum struktur pegawai pada unit pengawasan internal yang sebagian besar diisi oleh pegawai laki-laki, khususnya pada jabatan auditor.

B. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.2

No	Pendidikan Terakhir	Total	Persentase
1	SMA/SMK	-	-
2	D3/D4	-	-
3	S1	14	38,9%
4	S2	22	61,1%
Total		36	100%

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir Stara Satu (S1), diikuti oleh responden dengan pendidikan Stara Dua (S2). Kondisi ini menunjukkan bahwa responden memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan relavan pada bidang pengawasan serta pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat pendidikan yang dimiliki responden diharapkan dapat mendukung pemahaman terhadap standar dan proses audit yang dilaksanakan inspektorat.

C. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.3

No	Jabatan	Total	Persentase
1	Auditor ahli pertama	8	22,2%
2	Auditor ahli muda	16	44,4%
3	Auditor ahli madya	11	30,6%
4	Inspektur pembantu 3	1	2,8%
Total		36	100%

Berdasarkan tabel 4.3, responden penelitian memiliki jabatan yang beragam, keberagaman jabatan ini mencerminkan variasi tingkat pengalaman dan tanggung jawab responden dalam pelaksanaan audit dan pengawasan internal. Dengan adanya responden dari berbagai jenjang jabatan auditor, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peranan Inspektorat sebagai auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.1.2 Deskripsi Instrumen Penelitian

Instrumen yang diterapkan pada penelitian ini adalah kuesioner yang dibuat dengan cara terstruktur (wawancara konfirmasi). Kuesioner ini mencakup 18 pernyataan, yang dibagi menjadi dua variabel penelitian, yaitu variabel Peranan Inspektorat sebagai auditor internal dan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengukuran jawaban responden menggunakan skala likert dengan nilai bobot sebagai berikut : (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) setuju, dan (5) Sangat setuju.

Selain jawaban tertutup, kuesioner juga dilengkapi dengan kolom penjelasan tambahan yang bersifat opsional untuk memberikan kesempatan kepada responden dalam menjelaskan alasan atas jawaban yang diberikan.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data hasil pengisian kuesioner oleh responden. Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik data penelitian

tanpa melakukan pengujian hipotesis, sehingga dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terhadap setiap variabel yang diteliti.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5, dimana skor terendah menunjukkan penilaian paling negatif dan skor tertinggi menunjukkan penilaian paling positif. Untuk menginterpretasikan hasil jawaban responden, digunakan rentang skala (RS) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2019):

$$RS = (m-n)/k$$

Dimana :

RS = Rentang skala

N = Skor minimal

M = Skor maksimal

K = Jumlah kategori

Berdasarkan skala likert 1-5, maka diperoleh :

$$RS = (5-1)/5 = 0,80$$

Dengan demikian, kategori penilaian jawaban responden dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1,00-1,80 : Sangat tidak setuju

1,81-2,60 : Tidak setuju

2,61-3,40 : Netral

3,41-4,20 : Setuju

4,21-5,00 : Sangat setuju

Selanjutnya, dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Nilai rata-

rata digunakan untuk memahami kecenderungan umum dari penilaian yang diberikan oleh responden terhadap setiap variabel. Nilai minimum dan maksimum menunjukkan rentang skor yang diberikan oleh responden, sementara standar deviasi berfungsi untuk memperlihatkan sejauh mana variasi atau sebaran jawaban responden sepanjang periode pengamatan.

Selain memilih skala jawaban, para responden juga diberikan kolom tambahan untuk menuliskan tanggapan atau komentar. Tanggapan ini dipakai sebagai data pelengkap untuk mendukung hasil analisis serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi yang terjadi di lapangan.

4.2.2 Peranan Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Bagian ini menjelaskan mengenai penelitian terhadap peranan Inspektorat sebagai auditor internal berdasarkan hasil dari para responden. Penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana Inspektorat telah melaksanakan tugasnya dalam aspek pengawasan, pembinaan, serta evaluasi terhadap penerapan tata kelola di dalam pemerintah daerah. Informasi yang digunakan merupakan hasil dari kuesioner yang diisi oleh responden sesuai dengan kriteria peranan Inspektorat sebagai auditor internal.

Tabel 4.4

Jawaban Responden Pada Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal

Skala	STS		TS		N		S		SS		N	Total	Rata-rata
	F	FxS	F	FxS	F	FxS	F	FxS	F	FxS			
X.1	1	1	0	0	0	0	17	68	18	90	36	158	4,38
X.2	1	1	0	0	0	0	17	68	18	90	36	158	4,38
X.3	0	0	0	0	0	0	17	68	19	95	36	163	4,52

X.4	0	0	2	4	4	12	13	52	17	85	36	153	4,25
X.5	0	0	0	0	0	0	15	60	21	105	36	165	4,58
X.6	0	0	0	0	3	9	21	84	12	60	36	153	4,25
X.7	0	0	0	0	0	0	22	88	14	70	36	158	4,38
X.8	0	0	0	0	0	0	24	96	12	60	36	156	4,33
X.9	0	0	1	2	5	15	16	64	14	70	36	151	4,19
X.10	0	0	0	0	0	0	23	92	13	65	36	157	4,36
Rata-rata Total													4,41

Berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan nilai rata-rata total sebesar 4,41 untuk peranan inspektorat sebagai auditor internal berada pada interval 4,21-5,00 yang termasuk dalam kategori sangat baik, nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai responden cenderung memberikan jawaban pada skala setuju hingga sangat setuju berdasarkan rentang skala penilaian Likert 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden menilai Inspektorat telah menjalankan perannya secara optimal sebagai auditor internal khususnya dalam fungsi pengawasan, reuiu, pemantauan tindak lanjut hasil audit, serta pembinaan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah.

Tabel 4.5

Tanggapan Tambahan Responden terkait Peranan Inspektorat

Pernyataan Singkat	Skala	Tanggapan Responden
Pelaksanaan audit pengawasan internal berdasarkan dengan standar audit pemerintah	1	Belum sepenuhnya sesuai dengan standart yang berlaku
Pelaksanaan audit pengawasan secara independen dan objektif	1	Kadang masih kurang objektif
Reuiu Inspektorat membantu	2	Masih belum maksimal

OPD dalam memperbaiki kesalahan		
OPD menindak lanjuti rekomendasi Inspektorat sesuai batas waktu yang ditentukan	3	Sebagian besar sudah ditindak lanjuti namun masih ada yang belum sepenuhnya sesuai batas waktu
LKPD disusun secara andal dan bebas kesalahan material	3	Masih terdapat beberapa yang perlu diperhatikan

Berdasarkan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh responden, terdapat sebagian kecil dari responden yang menunjukkan pendapat tidak setuju serta netral terhadap beberapa pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit pengawasan internal oleh Inspektorat. Salah satu tanggapan yang muncul berkaitan dengan pernyataan tentang pelaksanaan audit pengawasan internal yang dilakukan sesuai standar audit pemerintah. Responden menyampaikan bahwa pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya mengikuti standar yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum audit telah dilaksanakan, masih ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar lebih konsisten dengan ketentuan dan pedoman audit yang telah ditentukan.

Selain itu, dalam pernyataan mengenai pelaksanaan audit pengawasan yang dilakukan dengan cara yang independen dan objektif, ada responden yang memberikan penilaian negatif dengan tanggapan bahwa pelaksanaan audit terkadang masih kurang objektif. Tanggapan ini menunjukkan adanya pandangan bahwa independensi dan objektivitas auditor internal belum sepenuhnya dirasakan oleh semua OPD. Situasi ini bisa dipengaruhi oleh kedekatan hubungan kerja antara auditor dan auditee, kekurangan sumber daya, atau tekanan yang muncul selama proses audit.

Temuan ini juga diperkuat oleh adanya responden yang memberikan penilaian netral dan tidak setuju serta menyatakan bahwa beberapa aspek dalam pelaksanaan revidi laporan keuangan belum sepenuhnya efektif. Responden menilai bahwa masih ada kebutuhan untuk perbaikan, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan peninjauan dan dukungan teknis kepada OPD. Ini menunjukkan bahwa meskipun Inspektorat telah melaksanakan tugasnya dengan baik secara umum, efektivitas pelaksanaan peninjauan dan bantuan teknis masih perlu diperkuat agar fungsi pengawasan dapat beroperasi dengan lebih baik dan merata.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sipayung & Morasa (2021) yang menyatakan bahwa audit internal berperan signifikan dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah, namun efektivitasnya masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaan di lapangan, terutama terkait konsistensi dan independensi audit. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan audit internal tidak hanya ditentukan oleh adanya prosedur dan standar, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan profesionalisme auditor.

Selain itu, penelitian Tarigan *et al* (2021) juga mengungkapkan bahwa meskipun peran pengawasan internal oleh Inspektorat telah dilaksanakan dengan baik, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang mempengaruhi optimalisasi fungsi audit internal. Kendala tersebut mencakup keterbatasan dalam pendampingan teknis serta belum optimalnya penerapan standar audit internal pemerintah secara konsisten.

Penelitian Tamuntuan *et al* (2023) dan Romarito (2023) juga menegaskan bahwa keterbatasan kompetensi, independensi auditor, serta keterbatasan waktu dan sumber daya dapat mempengaruhi objektivitas dan kualitas audit internal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan audit internal tidak terletak pada sistem yang ada, melainkan pada aspek pelaksanaan dan penguatan kapasitas auditor internal.

Berdasarkan hasil dan keterkaitannya dengan penelitian sebelumnya, Inspektorat diharapkan untuk terus meningkatkan kesesuaian pelaksanaan audit pengawasan internal dengan standar audit yang berlaku di pemerintahan melalui peningkatan pemahaman auditor terhadap standar dan regulasi yang ada. Peningkatan kualitas audit juga membutuhkan dukungan dari penguatan independensi dan objektivitas auditor internal sehingga hasil audit dapat diterima dengan lebih objektif oleh seluruh OPD.

Sejalan dengan penelitian Ihsan (2018) dan Eka Maulana (2020), Inspektorat diharapkan dapat memperkuat perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping teknis yang konsisten bagi OPD. Peningkatan intensitas reviu, penyediaan bimbingan teknis yang berkelanjutan, serta standarisasi prosedur reviu laporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan konsistensi pelaksanaan audit dan kualitas laporan keuangan secara menyeluruh.

Dengan penguatan peran tersebut, Inspektorat diharapkan dapat menjamin bahwa kualitas laporan keuangan yang sudah berada pada kategori sangat baik terus ditingkatkan secara konsisten dan merata di semua Organisasi Perangkat Daerah, sehingga tujuan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dapat dicapai dengan maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi Inspektorat sebagai auditor internal telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang, tetapi peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan revidi dan dukungan teknis kepada OPD masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit internal kedepannya.

4.2.3 Faktor Penghambat Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Pemerintah kabupaten Deli Serdang

Bagian ini membahas hasil penelitian faktor penghambat Inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan seberapa baik penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tabel 4.6

Jawaban Responden Pada Faktor Penghambat Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Skala	STS		TS		N		S		SS		N	Total	Rata-rata
	F	FxS	F	FxS	F	FxS	F	FxS	F	FxS			
Y.1	0	0	0	0	0	0	22	88	14	70	36	158	4,38
Y.2	0	0	0	0	1	3	23	92	12	60	36	152	4,22
Y.3	0	0	0	0	4	12	22	88	10	50	36	150	4,16
Y.4	0	0	0	0	0	0	23	92	13	65	36	157	4,36
Y.5	0	0	0	0	1	3	24	96	11	55	36	154	4,27
Y.6	0	0	0	0	0	0	23	92	13	65	36	157	4,36
Y.7	0	0	0	0	1	3	23	92	12	60	36	155	4,30
Y.8	0	0	0	0	1	3	25	100	10	50	36	153	4,25
Rata-rata Total												4,28	

Berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan nilai rata-rata total sebesar 4,28 yang berada pada interval 4,21-5,00 dan termasuk dalam kategori setuju/sangat baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai responden cenderung

memberikan jawaban pada skala setuju hingga sangat setuju. Secara kuantitatif, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah dinilai baik oleh responden. Namun demikian, hasil pengukuran tersebut tidak serta-merta meniadakan adanya hambatan dalam pelaksanaan peran Inspektorat sebagai auditor internal, justru terlihat jelas melalui analisis jawaban netral dan tanggapan tambahan responden.

Tabel 4.7

Tanggapan Tambahan Responden terkait Faktor Penghambat

Pernyataan Singkat	Skala	Tanggapan Responden
Konsistensi kebijakan akuntansi	3	Sebagian besar konsisten namun masih ada penyesuaian pada beberapa periode
Keterbandingan LKPD antarperiode	3	Bisa dibandingkan tapi masih ada yang berbeda tiap tahunnya

Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan konsisten kebijakan akuntansi antarperiode serta perbandingan laporan keuangan antarperiode. Beberapa responden memberikan tanggapan netral terhadap pertanyaan tentang konsisten kebijakan akuntansi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan, namun masih mengalami perubahan pada periode tertentu. Situasi yang sama juga terlihat dalam hal kemampuan membandingkan laporan keuangan, di mana responden mengungkapkan bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan, tetapi terdapat perbedaan antarperiode yang mungkin menyulitkan dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa hambatan yang dihadapi bukanlah bersifat struktural, tetapi lebih kepada masalah pelaksanaan dan konsistensi dalam penerapan kebijakan.

Hambatan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dinamika perubahan regulasi, penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi yang diterapkan pemerintah, serta perbedaan dalam pemahaman dan persiapan masing-masing OPD dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Selain itu, keterbatasan intensitas dalam pendampingan dan tinjauan yang dilakukan oleh Inspektorat juga berkontribusi pada ketidakseragaman dalam penerapan kebijakan akuntansi. Dalam praktiknya, kondisi ini menyebabkan laporan keuangan secara umum telah memenuhi standar, tetapi masih belum sepenuhnya stabil dan konsisten di antara periode yang berbeda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mahfuz & Hanum (2023) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan sistem informasi akuntansi dan kinerja aparatur. Selain itu, penelitian oleh Sari & Putra (2021) menegaskan bahwa perubahan kebijakan akuntansi dan lemahnya pengawasan internal pada tahap implementasi dapat menjadi faktor penghambat dalam menjaga keterbandingan laporan keuangan antarperiode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan tidak disebabkan oleh tidak adanya sistem atau kebijakan, tetapi pada konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi dan kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu. Situasi

ini menunjukkan bahwa isu yang dihadapi bersifat praktis dan memerlukan penguatan pada tahap pelaksanaan serta pengawasan internal.

Sejalan dengan penelitian Kesuma Puja Lestari *et al* (2023), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi aparatur, serta efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu, Inspektorat disarankan untuk berperan lebih aktif dalam memastikan bahwa setiap OPD memiliki pemahaman yang seragam terhadap kebijakan akuntansi yang diterapkan, khususnya ketika terjadi perubahan regulasi atau kebijakan baru.

Selain itu, penelitian Tamuntuan *et al* (2023) dan Romarito (2023) menegaskan bahwa keterbatasan pendampingan dan perbedaan tingkat pemahaman auditee dapat menjadi faktor penghambat dalam menjaga konsistensi laporan keuangan. Berdasarkan temuan tersebut, Inspektorat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping teknis yang konsisten bagi OPD melalui peningkatan intensitas reviu, bimbingan teknis, serta penyusunan pedoman penerapan kebijakan akuntansi yang lebih terstandarisasi.

Lebih lanjut, hasil penelitian Adira *et al* (2023) dan Kewo & Rufaedah (2024) menunjukkan bahwa efektivitas audit internal dan tata kelola pemerintahan yang baik memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar OPD serta peningkatan peran Inspektorat dalam mendorong tata kelola yang konsisten dan terintegrasi menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan yang ada.

Dengan memperkuat fungsi pendampingan, standarisasi kebijakan, serta koordinasi lintas OPD, diharapkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabu-

paten Deli Serdang tidak hanya baik secara kuantitatif, tetapi juga konsisten dan dapat diperbandingkan secara berkelanjutan antarperiode.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara umum, peranan Inspektorat sebagai auditor internal telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Kabupaten Deli Serdang. Ini terlihat dari sebagian besar responden yang memberikan penilaian setuju dan sangat setuju terhadap indikator-indikator peran Inspektorat serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun, hasil penelitian juga mencatat adanya beberapa kendala yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi dan perbandingan laporan keuangan antar periode.

Tanggapan responden yang netral serta beberapa catatan tambahan menunjukkan bahwa meskipun kualitas laporan keuangan sudah dalam kategori baik, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan dalam fungsi pengawasan, peninjauan, serta dukungan teknis dari Inspektorat agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan dengan lebih seragam dan terkoordinasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi aktual Inspektorat dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sekaligus menjadi dasar untuk menyusun kesimpulan dan saran yang ada di Bab V. Bab selanjutnya akan fokus pada penarikan kesimpulan penting dari hasil penelitian serta penyampaian saran yang diharapkan dapat

memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan peran Inspektorat dan mutu laporan keuangan Kabupaten Deli Serdang di masa depan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peranan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebagai auditor internal dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah termasuk kategori sangat baik. Ini terlihat dari banyaknya tanggapan setuju dan sangat setuju terhadap semua indikator penelitian yang menunjukkan pelaksanaan fungsi audit, reviu laporan keuangan, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dan pembinaan serta konsultasi yang berjalan dengan baik.

Namun, hasil penelitian juga mengindikasikan adanya perbedaan jawaban dari responden pada beberapa indikator tertentu, terutama terkait dengan pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit, perencanaan audit, ketepatan waktu dalam menyampaikan hasil audit, serta pembinaan dan konsultasi kepada OPD. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan peran Inspektorat telah berjalan dengan baik, masih ada aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal serta mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah, baik dalam praktik maupun akademis.

1. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemeriksaan dan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah tergolong sangat baik, auditor internal disarankan untuk terus meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan prosedur pemeriksaan. Hal ini penting agar temuan dan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat terus berkurang, terutama pada beberapa aspek yang masih menunjukkan tanggapan netral atau tidak setuju dari responden.
2. Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dianjurkan untuk memperkuat pengawasan internal dengan meningkatkan kemampuan auditor, melalui pelatihan teknis, pemahaman terbaru tentang regulasi, dan pendalaman audit yang berfokus pada risiko. Dengan upaya ini, diharapkan kualitas pemeriksaan dapat terus meningkat dan menghindari terulangnya kelemahan yang sama di masa depan.
3. Tanggapan tambahan dari responden menunjukkan masih ada potensi perbaikan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan dan konsistensi dalam melaksanakan prosedur. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi internal secara rutin terhadap proses audit, termasuk dokumentasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, agar pelaksanaan audit tidak sekadar formalitas, melainkan juga efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Bagi peneliti di masa mendatang, disarankan untuk menerapkan metode analisis yang lebih mendalam, seperti analisis inferensial atau pengujian hubungan antar variabel, serta memperluas jumlah dan karakteristik responden. Dengan cara ini, hasil penelitian mendatang diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan lebih rinci.

Dengan demikian, diharapkan temuan penelitian ini tidak hanya menjadi landasan evaluasi bagi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, tetapi juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan saat menginterpretasikan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert, sehingga hasilnya sangat bergantung pada pandangan subjektif responden. Meskipun responden adalah auditor internal yang mengerti tentang proses audit dan penyusunan laporan keuangan, perbedaan dalam pengalaman, tingkat pemahaman, serta perspektif masing-masing responden bisa memengaruhi jawaban yang mereka berikan.
2. Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa hampir semua responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju pada hampir semua pernyataan. Hal ini dapat menciptakan kecenderungan bias positif, di mana responden lebih

cenderung memberikan penilaian yang baik terhadap kondisi organisasi tempat mereka bekerja. Akibatnya, variasi dalam jawaban menjadi cukup terbatas dan bisa memengaruhi kedalaman analisis terhadap masalah yang diteliti.

3. Penelitian ini hanya menggunakan analisis statistik deskriptif yang mencakup nilai minimum, maksimum, mean, dan deviasi standar. Teknik analisis ini tidak bisa menjelaskan hubungan sebab akibat atau pengaruh antar variabel dengan mendalam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih berfokus pada gambaran kondisi yang dirasakan oleh responden, bukan pada pengujian hipotesis secara inferensial.
4. Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup auditor internal di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke inspektorat lain atau ke lembaga pemeriksa eksternal. Perbedaan karakteristik organisasi, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan internal di setiap masing-masing daerah dapat menghasilkan hasil penelitian yang bervariasi.
5. Penelitian ini tidak secara langsung mengamati faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti tingkat kepatuhan dari OPD, peraturan yang berubah, serta tekanan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut mungkin dapat memengaruhi kualitas LKPD, tetapi tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Armono, D., Wicaksono, N. I., & Fitriani, A. (2024). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 21(2), 617.
- Cecilia Lelly Kewo, & Yanti Rufaedah. (2024). *Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan Efektivitas Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara)*.
- Citra, S. R. (2023). Evaluasi pelaksanaan audit internal pada Inspektorat Kabupaten Sleman.
- Desi Fatimah, Ria Nelly Sari, & M. Rasuli. (2014). Fatimah, Desi, Ria Nelly- Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–15.
- Dwiyana, M. A., Yudantara, G. A. P., & Julianto, P. (2019). Implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan peran internal audit inspektorat daerah terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2).
- Dwi Windarsih, & Irwan Taufiq Ritonga. (2021). Hubungan Kualitas Review Laporan Keuangan Dengan Temuan Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Kabupaten/Kota SE-DIY. *Universitas Gadjah Mada*.

- Fakih, F., & Aulia Yudisiana, P. (2024). Fungsi Audit Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan(JIASK)*, 7(1). <http://www.kemendagri.go.id>,
- Fibriyanti, S. L. (2024). Analisis kualitas audit laporan keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 2(2), 392–404. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i2.3142>
- Hafsah, Ramdhansyah, & Hasan Sakti Siregar. (2017). Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Hutabarat, D., & Lubis, Z. (2021). Analisis pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kumpulan Dosen UMSU*, 18(2), 45–56.
- Ikhsan, A., Muhyarsyah, Hasrudy, T., & Oktaviani, A. (2014). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Bandung: Citapustaka Media.
- Ilham Dio Bhakti, & Ulfa Puspa Wanti Widodo. (2024). Peranan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Internal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 750–758. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.381>
- Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. (2022-2024). *Laporan Hasil Reviu atas LKPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022-2024*. Deli Serdang: Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.
- Kahfi, L. N., & Meutia, T. (2019). Pengaruh keahlian audit, kompleksitas tugas dan etika profesi terhadap kualitas audit pada pemerintah Kabupaten Samosir. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 53–65. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3340>

- Ketut, O., Kustina, T., & Zulianto, D. L. (2017). Peran audit internal dan komitmen manajemen dalam penerapan good corporate governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 2.
- Lalu Roby Rajafi, Gugus Irianto, & Zaki Baridwan. (2024). Analisis Determinan Kualitas Audit Internal Sektor Publik di Indonesia: Systematic Literature Review. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen*, 31(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v31i2.1437>
- Lestari, D. A., & Rahim, S. (2021). Dimensi internal auditor dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. *YUME: Journal of Management*, 4(2), 231–243. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.231>
- Lubis, K., & Meutia, T. (2019). Pengaruh Keahlian Audit Kompleksitas Tugas Dan Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit Pada Pemerintah Kabupaten Samosir. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 53–65. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3340>
- Made Ary Dwiyana, Gede Agus Pertama Yudiantara, & Putu Julianto. (2019). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Peran Internal Audit Inspektorat Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2).
- Mahasiswa, J., & Samudra, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada OPD Kabupaten Deli Serdang), 4(2).
- Mahfuz, R. P., & Hanum, Z. (2023). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 7(4), 2895–2904. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1626>
- Majidah, N., & Falikhatun, F. (2024). The role of internal audit on the quality of financial reports. JPPI. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/3954>

- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Maulana, & Eka. (2021). Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2.
- Muhammad Hafizh Ihsan. (2018). Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*.
- Pakpahan, R., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2022). Influence of internal control system weaknesses and audit quality on the quality of local government financial reports in Indonesia with good government governance as moderating. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 461–474. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.463>
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Deli Serdang Tahun 2017-2024*.
- Peraturan Pemerintah, Pub. L. No. 71, Lembaran Negara Republik Indonesia (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pub. L. No. 60, tentang Sistem Pengendalian Intern (2008).
- Rasdianto, E. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Penerbit Brama Ardian.
- Ratri, M. C., & Bernawati, Y. (2020). Penerapan standar profesional audit internal dan kualitas audit: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 22(1). <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Reyvisa, S. (2018). Analisis peran auditor internal dalam mendeteksi kecurangan pada PT. Haka Sentra Corporindo Makassar. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*.

- Rika, G. R. (2018). The effect of internal auditor competency on internal audit quality and its implication on the accountability of local government. *European Research Studies Journal*, XXI(4).
- Riyadi, S. (2020). Public Accountability in Government Financial Management. *Journal of Public Sector Studies*.
- Sari, F. M. (2022). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Batang). *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 3(1), 27–42.
- Septianingtyas, V. I., Alam, S., Julianti, D., & Tjan, S. (2023). Auditor internal sebagai quality assurance dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 237–250.
- Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(1). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.i>
- Sipayung, Y., Morasa, J., & Iriando, A. (2021). Evaluasi Audit Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Tomohon). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(3), 871–879.
- Siregar, M., Simanjuntak, R., & Lubis, H. (2025). Analisis sistem pengendalian internal dalam menunjang efektivitas persediaan barang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 5(1), 12–23. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Siti Adira, Cut Aulita Saputri, Arnita, & Mariana. (2024). Peran Inspektorat Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4). <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1392>
- Siti, A., Saputri, C. A., Arnita, A., & Mariana, M. (2024). Peran Inspektorat Daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Ekalaya: *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 78–90.
<https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1392>

Situmorang, F. (2021). Peranan Inspektorat dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Sri, W., & Arsyadona, A. (2025). Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah Dalam Mitigasi Risiko Fraud Pada Sektor Pemerintahan. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 223–238.
<https://doi.org/10.61132/rimba.v3i1.1594>

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukma Lesmana. (2011). Dampak Environment Uncertainty Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 11(2).

Widia Astuty. (2016). Peran Auditor Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Wiwin Aryani, Tri Widodo, & Maria Entina Puspita. (2024). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sdm Dan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Ilmu Ekonomi*, 8(4).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumentasi

Dokumentasi kegiatan penyerahan tautan kuesioner penelitian kepada Auditor di kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari proses pengumpulan data penelitian, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026.



2. Lampiran Kuesioner Penelitian

Yth Bapak/Ibu Responden

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi program Stara Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Saya :

Nama : Nurul Fadhillah Nasution

NPM : 2205170222

Prodi/Semester : Akuntansi / 8

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Bermaksud melakukan penelitian untuk penyusunan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang”** untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden saya.

Kepada Bapak/Ibu terimakasih saya ucapkan atas kesediaan dalam mengisi kuesioner ini, seluruh jawaban dan informasi yang Bapak/Ibu berikan akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja.

Hormat Saya

Nurul Fadhillah Nasution

2205170222

A. Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban atas pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi dan pengalaman Bapak/Ibu selama menjalankan tugas, dengan memilih salah satu skala penilaian tersedia.

skala penilaian yang digunakan sebagai berikut:

1. STS : SANGAT TIDAK SETUJU

2. TS : TIDAK SETUJU

3. N : NETRAL

4. S : SETUJU

5. SS : SANGAT SETUJU

Selain memilih skala jawaban, Bapak/Ibu juga dapat memberikan penjelasan atau alasan tambahan pada kolom yang disediakan (opsional) untuk memperjelas jawaban yang diberikan. Penjelasan ini digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian.

B. Informasi Responden

Sebelum menjawab pernyataan pada kuesioner, dimohon agar Bapak/Ibu untuk mengisi data berikut :

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Jabatan :

3. Daftar pernyataan

Indikator Peranan Inspektorat

No	Indikator	Pernyataan	Jawaban				
			STS	TS	N	S	SS
1.	Pelaksanaan audit pengawasan internal	Auditor internal melaksanakan audit pengawasan internal atas penyusunan LKPD sesuai dengan standar audit pemerintah.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
2.		Auditor internal melaksanakan audit pengawasan secara independen dan objektif dalam proses penyusunan LKPD.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
3.	Reviu laporan keuangan	Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan sebelum LKPD disampaikan ke BPK.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
4.		Reviu yang dilakukan inspektorat membantu OPD memperbaiki kesalahan sebelum LKPD diaudit oleh BPK.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
5.	Pemantauan tindak lanjut hasil audit	Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang telah diberikan kepada OPD.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
6.		OPD menindaklanjuti rekomendasi hasil audit inspektorat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan					

		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
7.	Pembinaan dan konsultasi	Inspektorat memberikan pembinaan dan konsultasi kepada OPD dalam penyusunan dan penyajian LKPD.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
8.		Pembinaan dan konsultasi yang diberikan inspektorat membantu OPD memahami standar penyusunan LKPD.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
9.	Efektivitas rekomendasi audit	Rekomendasi audit Inspektorat efektif dalam memperbaiki kelemahan penyusunan laporan keuangan daerah.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
10.		Rekomendasi audit inspektorat mendorong peningkatan kepatuhan OPD terhadap standar akuntansi pemerintahan.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					

4. Daftar Pernyataan

Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Indikator	Pernyataan	Jawaban				
			STS	TS	N	S	SS
1.	Relevan	Informasi yang disajikan dalam LKPD telah relevan dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas					

		jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
2.		LKPD menyajikan informasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
3,	Andal	LKPD disusun secara andal dan bebas dari kesalahan material.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
4.		Data dan informasi dalam LKPD didukung oleh bukti yang memadai dan dapat dipercaya.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
5.	Dapat dipahami	Informasi dalam LKPD mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
6.		Penyajian LKPD menggunakan istilah dan format yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
7.	Dapat dibandingkan	LKPD dapat dibandingkan antarperiode untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					
8.		Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam LKPD konsisten antarperiode.					
		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Bapak/Ibu pada pernyataan sebelumnya. (opsional)					

		lumnya. (opsional)	
--	--	--------------------	--

3. Lampiran Rekapitulasi Hasil Kuesioner Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	24	66,7%
2	Perempuan	12	33,3%
Total		36	100%

No	Pendidikan Terakhir	Total	Persentase
1	SMA/SMK	-	-
2	D3/D4	-	-
3	S1	14	38,9%
4	S2	22	61,1%
Total		36	100%

No	Jabatan	Total	Persentase
1	Auditor ahli pertama	8	22,2%
2	Auditor ahli muda	16	44,4%
3	Auditor ahli madya	11	30,6%
4	Inspektur pembantu 3	1	2,8%
Total		36	100%

Auditor internal melaksanakan audit pengawasan i Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Auditor internal melaksanakan audit pengawasan s		
4	Ya sesuai	4
4	Ya Audit Harus Berdasarkan Standar Audit Pemerir	4
4		4
5		5
4		4
4		4
5	Biar sesuai peraturan yg ada	5
5		4
4	Kita membenahi internal sebelum memeriksa interi	4
5		5
5		5
5		5
5	Ss	5
5		5
4	Sesuai peraturan	5
5		5
4		4
4		4
5		4
4		4
4		4
4	Isfektorat sebagai perpanjangan tangan Bupati dal:	4
5	Karen LKPD harus memakai standard audit	5
5		5
5		5
5	Sesuai aturan dan ketentuan yg berlaku	5
5	Untuk membandingkan Antara Perencanaan dgn Pr	5
4	Auditor dan PPUPD adalah pengawas pembangun	4
4		4
1	Belum sepenuhnya sesuai dengan standart yg berl:	1
5		5
4	Sesuai PP 12 Tahun 2017	5
5	Lebih tepat nya pelaksanaan reviu LKPD	5
4		4
5		5
4	Sesuai regulasi	4

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban	Inspektorat melakukan revidi atas laporan keuangan	Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban
Ya	4	
audit pengawasan dilakukan secara independen dan	4	Inspektorat melakukan revidi atas laporan keuangan
	4	
	5	
	4	
	4	
Harus biar objektif	5	Biar ketika diperiksa BPK tidak banyak catatan
	4	
Dalam melakukan pemeriksaan tidak boleh ada teka-teki	4	
	5	
	5	
	5	
Sesuai peraturan	5	Sesuai peraturan
	5	
	4	
	4	
	5	
	4	
	4	
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi inspektorat dan	4	Setiap OPD dalam penyusunan anggaran terlebih dahulu
Karena ke independenan audit dapat terlaksana dan	5	Karena begitu menurut peraturan yg berlaku
	5	
	5	
Tidak ada intervensi dari pihak manapun	4	Sesuai aturan
Agar terhindar dari intervensi dari pimpinan	5	Utk melihat bgmn keabsahan dan kebenaran laporan
Auditor dan PPUPD adalah pengawas pembangunan	4	Hasil dari revidi keuangan inspektorat sebagai perbandingan
	4	
Kadang masih kurang objektif	5	
	5	
Sesuai PP 12 Tahun 2017	5	Sesuai PP 12 Tahun 2017
	5	
	4	
	5	
	4	

Reviu yang dilakukan inspektorat membantu OPD r. Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban. Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tinda		
2	Masih belum maksimal	4
4	Benar	4
5		4
5		5
4		4
4		4
5	Biar sesuai peraturan	5
4		4
4		5
5		5
5		5
5		5
3	N	5
5		5
4	Sesuai peraturan	5
5		5
4		4
4		4
5		5
4		4
2		4
4		4
5	Supaya LKPD tersaji dengan baik	5
3		5
5		5
4	Sesuai peran APIP meriviu	4
5	Agar TDK terjadi LG kesalahan dim laporan keuang	5
5	Sebagai bahan koreksi dan perbaikan OPD	5
4		4
5		5
3		4
5	Sesuai PP 12 Tahun 2017	5
5		5
4		5
5		5
3		4

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban OPD menindaklanjuti rekomendasi hasil audit inspeksi		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban	
	4		
Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tinda	4	OPD menindaklanjuti rekomendasi hasil audit inspeksi	
	4		
Utk meyakinkan bhwa opd melaksanakan rekomend	4		
	4		
	4		
Biar sesuai peraturan	5	Harus biar sesuai peraturan	
	4		
	4		
	4		
	5		
	5		
Ss	4	S	
	4		
Sesuai Tupoksi Inspektorat	4	Sesuai peraturan	
	5		
	4		
	4		
	5		
	4		
	4		
Hal ini berkaitan dgn temuan dan kesempatan dari	4	Sesuai ketentuan dan jadwal yg telah disampaikan.	
Supaya LKPD tercipta dengan baik	5	Sesuai dengan aturan yang berlaku	
	4		
	5		
Memastikan TLHP sdh lengkap sesuai LHP	5	Sesuai aturan	
Untuk melihat perbaikan atas rekomendasi hasil au	5	Untuk menghindari sanksi administratif dan sanksi	
tindak lanjut temuan inspektorat diperbaiki dan dile	4	Dalam penugasan Tim Inspektorat mendapat Surat	
	4		
	3		
	3	Sebagian besar sudah ditindaklanjuti namun masih	
Sesuai PP 12 Tahun 2017	5	Sesuai PP 12 Tahun 2017	
	5		
	4		
	5		
	3	Belum semua	

Inspektorat memberikan pembinaan dan konsultasi. Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban. Pembinaan dan konsultasi yang diberikan Inspektorat		
4		4
4	Inspektorat memberikan pembinaan dan konsultasi	4
4		4
4		4
4		4
4		4
5	Biar sesuai peraturan	5
4		4
4		4
5		4
5		5
4		4
4	S	4
5		5
4	Sesuai peraturan	5
5		5
4		4
4		4
5		4
4		4
4		4
4	Guna utk tdk keluar dari visi misi dan aturan yg berl	4
5	Supaya LKPD dapat terlaksana dengan baik	5
5		4
5		5
4	Agar sesuai aturan	4
5	Agar OPD dapat memahami dan mengerti bagaim	5
4	Agar hasil temuan dijawab utk dilengkapi dan diper	4
4		4
4		4
5		5
5	Sesuai PP 12 Tahun 2017	5
5		5
4		4
5		5
4		4

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban	Rekomendasi audit Inspektorat efektif dalam mem	Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban
	4	
Ya Pembinaan dan konsultasi yang diberikan inspe	5	Rekomendasi audit Inspektorat efektif dalam mem
	4	
	4	
	4	
	4	
Biar sesuai peraturan	5	Biar sesuai peraturan
	4	
	4	
	5	
	5	
	5	
S	3	N
	5	
Sesuai SOP Inspektorat	4	Sesuai Standar Pemeriksaan
	5	
	4	
	4	
	4	
	3	
	2	
	4	Agar menjadi catatan dalam pekerjaan selanjutnya
Supaya dapat terlaksana laporan keuangan yang bi	5	
	3	
	5	
Agar sesuai aturan dan ketentuan yg berlaku	4	Karena dapat memperbaiki kalau tdk sesuai aturan
Agar OPD taat dan patuh terhadap standar penyus	5	Agar efektif dalam memperbaiki kesalahan yg ada.
Dengan demikian pengelolaan keuangan di OPD m	5	Sebagai bahan perbaikan untuk pengolaan keuang
	3	
	4	
	4	
Sesuai PP 12 Tahun 2017	5	Sesuai PP 12 Tahun 2017
	5	
	3	
	5	
	4	

Rekomendasi audit inspektorat mendorong pening Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaba Informasi yang disajikan dalam LKPD telah relevan		
4		4
4	Rekomendasi audit inspektorat mendorong pening	4
4		4
4		4
4		4
4		4
5	Biar sesuai peraturan	5
4		4
4		4
5		5
5		5
5		5
4	S	4
5		5
4	Sesuai peraturan	4
5		5
4		4
4		4
4		4
4		4
4		4
4	Agar selalu mematuhi aturan	4
5		5
4		5
5		5
4	Karena rekomendasi yg di berikan sesuai aturan yg	4
5	Agar OPD patut dan patuh dalam THD standar akur	5
4	Mengurangi resiko keuangan	4
4		4
4		4
5		5
5	Sesuai PP 12 Tahun 2017	5
5		5
4		4
5		5
4		4

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban LKPD menyajikan informasi keuangan yang sesuai		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban	
	4		4
Informasi yang disajikan dalam LKPD telah relevan	4	LKPD menyajikan informasi keuangan yang sesuai	4
	4		4
	4		4
	4		4
Biar sesuai peraturan	5	Biar sesuai peraturan	5
	4		4
	4		4
	5		5
	5		5
	4		4
S	4	S	4
	5		5
Sesuai peraturan	4	Sesuai peraturan	4
	5		5
	4		4
	4		4
	4		4
	4		4
Benar utk memprogram kegiatan tahun berikutnya	4		4
	5		5
	5		5
Karena sdh sesuai aturan	4	Karena dibuat sesuai aturan yg berlaku	4
Dengan Informasi yg relevan dapat memudahkan d	5	LKPD Ats Laporan Keuangan memudahkan bagi pe	5
	4	Ankutabel dan akurat	4
	4		4
	4		4
	5		5
Sesuai PP 12 Tahun 2017	5	Sesuai PP 12 Tahun 2017	5
	3	Lebih tepat nya informasi yg disajikan sesuai keten	3
	4		4
	5		5
	4		4

LKPD disusun secara andal dan bebas dari kesalahan: Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Data dan informasi dalam LKPD didukung oleh buk		
4		4
4	LKPD disusun secara andal dan bebas dari kesalahan	4
4		4
3		4
4		4
4		4
5	Biar sesuai peraturan	5
4		4
4		4
4		4
5		5
4		4
4	S	4
5		5
4	Sesuai peraturan	4
5		5
4		4
4		4
4		5
4		4
4		4
4	Harapan nya begitu	4
5		5
3		5
5		5
4	Karena sdh sesuai aturan	4
5	Laporan sudah di susun dgn handal dan bebas dari	5
4	Sesuai ketentuan	4
4		4
4		4
3	Masih terdapat beberapa yang perlu diperhatikan	5
5	Sesuai PP 12 Tahun 2017	5
5		5
4		4
5		5
3		4

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban	Informasi dalam LKPD mudah dipahami oleh pengguna	Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban
	4	
Data dan informasi dalam LKPD didukung oleh bukti	4	Informasi dalam LKPD mudah dipahami oleh pengguna
	4	
	4	
	4	
Biar sesuai peraturan	5	Biar sesuai peraturan
	4	
	4	Agar lebih mudah melaksanakan kegiatan
	4	
	5	
	4	
S	4	S
	5	
Sesuai peraturan	4	Sesuai peraturan
	5	
	4	
	4	
	4	
	4	
Transportasi	4	Agar dalam pelaksanaan tdk menyebabkan bias dan
	5	
	3	
	5	
Sdh sesuai aturan	4	Karena disajikan lengkap dan jelas aturan sebagai
Karena telah didukung dgn bukti yg memadai dan c	5	Karena mudah di pahami oleh pengguna laporan.
Disajikan dlm bentuk laporan dan dilengkapi bukti c	4	Agar Obriki dapat memahami
	4	
	4	
	5	
Sesuai PP 12 Tahun 2017	5	Sesuai PP 12 Tahun 2017
	5	
	4	
	5	
	4	

Penyajian LKPD menggunakan istilah dan format y. Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban LKPD dapat dibandingkan antarperiode untuk menil		
4		3
4	Penyajian LKPD menggunakan istilah dan format y	4
4		4
4		5
4		4
4		4
5	Biar sesuai peraturan	5
4		4
4		4
4		4
5		5
4		4
4	S	4
5		5
4	Sesuai Peraturan	4
5		5
4		4
4		4
4		4
4		4
4	Guna memudahkan dalam pelaporan	4
5		5
5		4
5		5
4	Agar dapat digunakan sebagai acuan/pedoman	4
5	Mudah di pahami oleh pengguna laporan keuangan	5
5	Dapat dibaca dan dipahami siapa saja	4
4		4
4		4
5		5
5	Sesuai PP 12 Tahun 2017	5
5		5
4		4
5		5
4		4

Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam LKPD k		Jika berkenan, mohon jelaskan alasan atas jawaban	
Bisa dibandingkan tapi masih ada yg berbeda tiap t	4		
LKPD dapat dibandingkan antarperiode untuk meni	4	Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam LKPD k	
	3	Sebagian besar konsisten namun masih ada penye	
	4		
	4		
	4		
Biar sesuai peraturan	5	Biar sesuai peraturan	
	4		
	4		
	4		
	5		
	4		
S	4	S	
	5		
Sesuai Peraturan	4	Sesuai peraturan	
	5		
	4		
	4		
	4		
	4		
	4		
Agar tergambar peningkatan dan kegagalan bili	4	Benar	
	5		
	4		
	5		
Untuk perbaikan ke depan nya	4	Karena sesuai aturan yg berlaku	
Karena bermanfaat utk perbandingan antar periode	5	Karen sudah konsisten dgn kebijakan akuntansi yg	
Sebagai perbandingan dan perbaikan utk pengolah	4	Tiap tahun anggaran	
	4		
	4		
	4		
Sesuai PP 12 Tahun 2017	5	Sesuai PP 12 Tahun 2017	
	5		
	4		
	5		
	4		

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Beranda > Hasil Pemeriksaan > Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) > LKPD Kabupaten Deli Serdang

LKPD Kabupaten Deli Serdang



- LKPD Tahun 2017 – WDP
- LKPD Tahun 2018 – WTP
- LKPD Tahun 2019 – WTP
- LKPD Tahun 2020 – WTP
- LKPD Tahun 2021 – WTP
- LKPD Tahun 2022 – WTP
- LKPD Tahun 2023 – WTP



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 5 Mei 2023

Nomor : 124b/S/XVIII.MDN/05/2023
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2022

**Yth. Bupati Deli Serdang
di
Lubuk Pakam**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LK Pemkab Deli Serdang TA 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Deli Serdang dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Deli Serdang TA 2022 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Data pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Sarang Burung Walet belum lengkap dan akurat;
- b. Kekurangan volume 16 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) sebesar Rp804.409.754,62;
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati, antara lain agar:

1. Mengajukan usulan pemindahan status atas lahan sekolah dan puskesmas yang ada di kawasan hutan;
2. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) agar memproses pengajuan TGR dari OPD;
3. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda):
 - a. Melakukan pemeriksaan PBB P2 ke 28 bidang pada Kawasan Industri Medan (KIM) untuk memastikan nilai potensi PBB P2 sebesar Rp1.662.812.008,00;
 - b. Menggunakan data perizinan dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam pendataan pengusaha sarang burung walet;
 - c. Berkoordinasi dengan Balai Karantina Pertanian Kualanamu atau Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian untuk memperoleh data riil produksi sarang burung walet.
4. Memerintahkan Kepala Dinas SDABMBK:
 - a. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan pengawas lapangan lebih cermat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp37.437.549,99;
 - c. Memproses potensi kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp668.359.500,31.
5. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku pejabat penatausahaan barang untuk mengkaji alternatif perolehan aset tanah sekolah dan puskesmas pada tanah eks HGU PTPN II dan PT KAI, atau mengoordinasikan penganggaran ganti rugi secara bertahap;
6. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan lebih optimal berkoordinasi dengan kepala desa untuk pengajuan sertifikat tanah sekolah dan puskesmas.

Untuk jelasnya kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor 41.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 dan Nomor 41.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023, bertanggal 2 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Deli Serdang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Deli Serdang



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 22 Mei 2024

Nomor : 154.B /S/XVIII.MDN/05/2024
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2023

**Yth. Bupati Deli Serdang
di**

Lubuk Pakam

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pekab) Deli Serdang TA 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Deli Serdang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Deli Serdang TA 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

- 1. Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Penganggaran pendapatan pajak tidak terukur secara rasional serta terdapat defisit riil melebihi ketentuan yang mengakibatkan membebani keuangan daerah tahun berikutnya sebesar Rp193.598.418.289,50;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp608.350.412,00;
- c. Pengelolaan kas pada 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum tertib yang mengakibatkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Deli Serdang, diantaranya agar memerintahkan:

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menganggarkan pajak daerah berdasarkan analisis capaian tahun sebelumnya dan secara rasional;
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) lebih cermat dalam menyusun usulan anggaran Pajak Daerah;
- c. Sekretaris DPRD memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp608.350.412,00 dan menyetorkan ke kas daerah;
- d. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) lebih optimal dalam memantau implementasi elektronifikasi transaksi pendapatan retribusi dan transaksi belanja pada SKPD;
- e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengusulkan rancangan perjanjian kerja sama pengelolaan rekening Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan dengan Bank Sumut kepada Bupati;
- f. Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan Bendahara Sekolah terkait memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) ke Kas Negara sebesar Rp487.550.116,91.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 47.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 47.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Deli Serdang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196910011996031001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Deli Serdang



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 23 Mei 2025

Nomor : 167b/S/XVIII.MDN/5/2025
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2024

**Yth. Bupati Deli Serdang
di**

Lubuk Pakam

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum memadai yang mengakibatkan kehilangan kesempatan penerimaan pajak daerah dari BPHTB sebesar Rp5.430.642.654,10 dan potensi kekurangan penerimaan minimal atas PBJT restoran, PBJT hotel, PBJT kesenian dan hiburan serta Pajak MBLB tahun pajak 2024 sebesar Rp352.150.733,40;
- b. Kekurangan volume dan mutu atas 20 paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp777.565.518,72 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp836.761.013,50;
- c. Kebijakan akuntansi yang memuat kebijakan berdasarkan PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi belum ditetapkan dan pemanfaatan BMD belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan entitas pelaporan dan akuntansi belum mempunyai pedoman yang rinci dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan tentang

Properti Investasi dan pemanfaatan BMD dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah tidak tercapai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan kepada Bupati Deli Serdang, diantaranya agar memerintahkan:

- a. Kepala Bapenda memproses kekurangan penerimaan Pajak TA 2024 dan menyetorkannya ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas BPHTB sebesar Rp5.430.642.654,10 dan Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas PBJT restoran, PBJT hotel, PBJT kesenian dan hiburan serta Pajak MBLB minimal sebesar Rp352.150.733,40;
- b. Kepala Dinas SDABMBK untuk memproses dan menyetorkan ke Kas Daerah terkait kekurangan volume dan mutu sebesar Rp777.565.518,72 dan memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp836.761.013,50;
- c. Kepala BKAD untuk memutakhirkan kebijakan akuntansi sesuai SAP dan Sekretaris Daerah untuk mengatur pelaksanaan pemanfaatan BMD dan meninjau perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD sesuai ketentuan dan kewenangannya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 44.A/LHP/XVIII.MDN/5/2025 dan Nomor 44.B/LHP/XVIII.MDN/5/2025, bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Deli Serdang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP
NIP 197301111998031001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Deli Serdang

8. Simpulan dan rekomendasi.

- a. Tim Reviu melaksanakan reviu secara paralel bersamaan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.
- b. Berdasarkan saran-saran perbaikan pada penyusunan laporan keuangan pada entitas akuntansi, dan setelah diterima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk direviu menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan hasil reviu, namun masih ada beberapa catatan yang perlu dilengkapi dan dilakukan koreksi yaitu:
 1. Terdapat selisih saldo pendapatan transfer pemerintah pusat di LRA antara saldo Audited 2021 dengan saldo 2021 yang disajikan pada laporan keuangan tahun 2022
 2. Terdapat selisih penyajian Aset Tetap pada Neraca dengan penambahan modal dalam LRA
 3. Terdapat penyajian pada pos Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang belum didukung dengan addendum kontrak sebesar Rp4.610.486.371,00

4. Terdapat selisih Belanja Modal asset lainnya dengan Aset Tidak berwujud senilai Rp1.135.077.600,00
5. Terdapat kesalahan pencatatan/pengakuan mutasi tambah/kurang Utang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
6. Terdapat selisih nilai antara beban amortisasi pada Laporan Operasional (LO) dengan Pertambahan akumulasi Penyusutan Neraca

Atas catatan tersebut direkomendasikan kepada:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang agar :
 - a. Melakukan koreksi atas pencatatan nilai pendapatan transfer pemerintah pusat pada LRA.
 - b. Melakukan koreksi atas atas saldo akun-akun asset tetap dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK
 - c. Melakukan koreksi atas nilai asset tidak berwujud sebesar Rp1.135.077.600,00
 - d. Melakukan koreksi atas amortisasi untuk mendapatkan nilai yang sesuai
2. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang agar melengkapi dokumen Adendum kontrak untuk KDP senilai Rp4.610.486.371,00
3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang agar melengkapi dan melakukan koreksi terhadap pencatatan utang belanja dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

8. Simpulan dan rekomendasi.

- a. Tim Reviu melaksanakan reviu secara paralel bersamaan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 *Anaudited*.
- b. Berdasarkan saran-saran perbaikan pada penyusunan laporan keuangan pada entitas akuntansi, dan setelah diterima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk direviu menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan hasil reviu, namun masih ada beberapa catatan yang perlu dilengkapi dan dilakukan koreksi yaitu:
 - 1) Terdapat kekurangan penyajian nilai persediaan sebesar Rp8.389.838.000,00
 - 2) Terdapat Kekurangan Pencatatan Piutang lainnya sebesar Rp1.528.628.000,00

- 3) Terdapat penyajian nilai aset tanah sebesar Rp14.598.308.000,00 tidak dilengkapi dengan dokumen sumber yang memadai.
- 4) Terdapat kelebihan penyajian nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp626.890.000,00
- 5) Terdapat kekurangan penyajian nilai aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp284.528.000,00
- 6) Terdapat kekurangan penyajian nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp431.128.000,00
- 7) Terdapat kekurangan pencatatan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp35.240.981,00
- 8) Terdapat kekurangan penyajian Aset Tidak berwujud senilai Rp96.570.000,00
- 9) Terdapat kekurangan pencatatan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp68.579.500,00.
- 10) Terdapat Kelebihan penyajian utang belanja sebesar Rp3.339.385.680,50
- 11) Terdapat Kekurangan penyajian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp3.061.489.496,00.
- 12) Terdapat kelebihan penyajian Beban LO sebesar Rp12.908.106.599,50

Atas catatan tersebut direkomendasikan kepada:

- 1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang agar :
 - a. Melakukan koreksi atas penyajian nilai persediaan sebesar Rp8.389.838.000,00.
 - b. Melakukan koreksi atas penyajian Piutang lainnya sebesar Rp1.528.628.000,00.
 - c. Melakukan koreksi atas penyajian nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp626.890.000,00
 - d. Melakukan koreksi atas penyajian nilai aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp284.528.000,00.
 - e. Melakukan koreksi atas penyajian nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp431.128.000,00
 - f. Melakukan koreksi atas penyajian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp35.240.981,00
 - g. Melakukan koreksi atas penyajian Aset Tidak berwujud lainnya senilai Rp96.570.000,00.
 - h. Melakukan koreksi atas penyajian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp68.579.500,00.
 - i. Melakukan koreksi atas penyajian utang belanja sebesar Rp3.339.385.680,50

8. Simpulan dan rekomendasi.

- a. Tim Reviu melaksanakan reviu secara paralel bersamaan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024 *Anaudited*.
- b. Berdasarkan saran-saran perbaikan pada penyusunan laporan keuangan pada entitas akuntansi, dan setelah diterima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk direviu menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan hasil reviu, namun masih ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti yaitu:
 - (1) Terdapat kekurangan penyajian Piutang lainnya sebesar Rp2.051.540.000,00
 - (2) Terdapat kekurangan penyajian nilai persediaan sebesar Rp8.648.420.000,00
 - (3) Terdapat kekurangan penyajian nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp77.328.385.599,00
 - (4) Terdapat kelebihan penyajian utang belanja sebesar Rp1.241.794.053,00
 - (5) Terdapat kekurangan penyajian ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp89.378.929.652,00

Atas catatan tersebut direkomendasikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang agar :

- a. Melakukan koreksi atas penyajian Pencatatan Piutang lainnya sebesar Rp2.051.540.000,00
- b. Melakukan koreksi atas penyajian nilai persediaan sebesar Rp8.648.420.000,00
- c. Melakukan koreksi atas penyajian nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp77.328.385.599,00
- d. Melakukan koreksi atas penyajian nilai utang belanja sebesar Rp1.241.794.053,00
- e. Melakukan koreksi atas penyajian nilai ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp89.378.929.652,00



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 478 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/09/07/2025

Medan, 09/07/2025

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurul Fadhillah Nasution
NPM : 2205170222
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Adanya masalah pada kualitas Audit Internal di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dan Bagaimana cara supaya Kualitas Audit menjadi Efektif

Rencana Judul : 1. PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN KEPATUHAN PADA STANDAR AUDIT PEMERINTAH (SAP) TERHADAP KUALITAS AUDIT INTENAL
2. PENGARUH KEPATUHAN PADA KODE ETIK, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN AUDIT TERHADAP KINERJA AUDITOR
3. PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN PELATIHAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT INTERNAL

Objek/Lokasi Penelitian : KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN DELI SERDANG

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Nurul Fadhillah Nasution)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 478/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/09/07/2025

Nama Mahasiswa : Nurul Fadhillah Nasution
NPM : 2205170222
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan
Tanggal Pengajuan Judul : 09/07/2025
Nama Dosen pembimbing^{*)} : Sukma Lermany, SE, Msi, Phd AS

Judul Disetujui^{**)}

Analisis peramalanInspektorat sebagai Auditor Internal
Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas
Laporan keuangan pemerintahan kab. Deli Serdang

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan,

Dosen Pembimbing

(Sukma Lermany SE, Msi, Ph.D)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth.

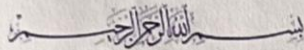
Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 08 Oktober 2025



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : N U R U L F A D H I L L A H N S T

NPM : 2 2 0 5 1 7 0 2 2 2

Tempat/Tgl Lahir : S I B O L G A 2 0 A G U S T U S 2 0 0 4

Program Studi : Akuntansi / Manajemen / Ekonomi Pembangunan

Alamat Mahasisw : J I N T H A M R I N N O 2

Tempat Penelitian: B A D A N K E S A T U A N B A N G S A

Alamat Penelitian : J I N K A R Y A D H A R M A N O 4
K E C L U B U K P A K A M

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon

(
M. Shareza Hafiz, SE., M. Acc

(
Nurul Fadhilah Nasution



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/18/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang lebih baik dari apa dilakukan
 sebelum dan sesudahnya

Nomor : 3142/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Riset**

Medan, 20 Rabi'ul Akhir 1447 H
 13 Oktober 2025 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Deli Serdang
 Jln. Karya Dharma No. 4 Kec. Lubuk Pakam
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nurul Fadhillah Nasution
 Npm : 2205170222
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VII (Tujuh)
 Judul Tugas Akhir : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Hidayati, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502

Tembusan :
 1. Peringgal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/Ak.Pj/PT/18/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 3142/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 15 Agustus 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Nurul Fadhillah Nasution
 N P M : 2205170222
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli serdang

Dosen Pembimbing : **Sukma Lesmana, SE, M.Si, Ph.D**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan "**BATAL**" bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **13 Oktober 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 20 Rabi'ul Akhir 1447 H
 13 Oktober 2025 M




 Dekan
Dr. H. Januri, SE, MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertinggal





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon. 061-7952964

e-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 909

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 3142 Tanggal 13 Oktober 2025 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset oleh :
 - a. Nama : **Nurul Fadhillah Nasution**
 - b. Alamat : Jln. Thamrin No. 2
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIM/KTP : 1207286008040001
 - e. Jurusan : Akuntansi
 - f. Judul : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Lapcran Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang
 - g. Daerah/lokasi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Deli Serdang
 - h. Lama : 3 (tiga) Bulan Terhitung 13 Oktober 2025 s.d 11 Januari 2026
 - i. Peserta : 1 orang yaitu Nurul Fadhillah Nasution
 - j. Penanggung Jawab : Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 14 Oktober 2025

**Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG**



Drs. ZAINAL ABIDIN HUTAGALUNG, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700511 199003 1 006

Tembusan:

1. Bapak Bupati Deli Serdang (sebagai laporan)
2. Yth. Ka. BAPPEDA LITBANG Kab. Deli Serdang
3. Yth. Ka. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Deli Serdang
4. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Arsip



Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPS. Untuk mengecek keaslian dokumen dengan scan pada QRcode, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang
 Pos-el: bappedalitbang@deliserdangkab.go.id
 Laman: <https://bappedalitbang.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 14 Oktober 2025

Nomor : 000.9 / 7567
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Yth. Inspektur Kabupaten Deli Serdang

di
 Tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/909 tanggal 14 Oktober 2025 dan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 3142/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal permohonan Izin Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

- | | |
|---------------------|---|
| a. Nama | : Nurul Fadhillah Nasution |
| b. Alamat | : Jl. Thamrin No. 2 |
| c. NIP/NIM/KTP | : 1207286008040001 |
| d. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| e. Jurusan/Prodi | : Akuntansi |
| f. Judul/Tema | : Analisis Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang |
| g. Daerah/Lokasi | : Inspektorat Kabupaten Deli Serdang |
| h. Lama | : 3 (tiga) Bulan terhitung 13 Oktober 2025 s.d 11 Januari 2025 |
| i. Peserta | : Sendiri |
| j. Penanggung Jawab | : Dr. H. Januri, SE, MM, M.Si, CMA |

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan riset pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN KABUPATEN DELI SERDANG



Dr. Ir. REMUS HASIHOLAN PARDEDE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
 NIP. 196605061992031004

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Peringgal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK-BAN-PT/AL/Pp/PT/11/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 702/II.3.AU/UMSU-05/F/2026
 Lamp. :
 Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 25 Sya'ban 1447 H
 13 Februari 2026 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
Inspektorat Kabupaten Deli Serdang
 Jl. Mawar No.6, Perbarakan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
 Di-
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nurul Fadhillah Nasution
 N P M : 2205170222
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
 1. Pertinggal

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
 NIDN. 0107087801





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
INSPEKTORAT

Jalan Mawar Nomor 06 Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20514
Telepon (061)-7951646 Faksimile (061)-7951646
Pos-el: inspektoratdeliserdang@gmail.com, Laman: <https://inspektorat.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 19 Februari 2026

Nomor : 000.1/114/INSP/2026
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di

Tempat

-
Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 702/II.3.AU/UMSU-05/F/2026 tanggal 13 Februari 2026 hal Menyelesaikan Riset.

Nama : Nurul Fadhillah Nasution
NIP : 2205170222
Prodi : Akuntansi

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa Mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan Riset di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. Salam Deli Serdang Sehat.

Inspektur Kabupaten Deli Serdang



H. Edwin Nasution, SH, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19741221 199803 1 010



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nurul Fadhillah Nasution
NPM : 2205170222
Nama Dosen Pembimbing : Sukma Lesmana, M.Si., Ph.D
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan
Judul Penelitian : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	dasar belakang harus menjelaskan fenomena yang di dukung teori dan data	11/10-2025	<i>[Signature]</i>
Bab 2			
Bab 3	- diperbaiki secara metode penelitian & pedoman	12/11-2025	<i>[Signature]</i>
Daftar Pustaka	siapa yang dicari? (data?)	3/12-2025	<i>[Signature]</i>
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	Acc pembimbing lanjutkan ke seminar	4/12-2025	<i>[Signature]</i>

Medan, 08 Desember 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.)

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Sukma Lesmana, M.Si., Ph.D)



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238**

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 19 Desember 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nurul Fadhillah Nasution*
 NPM. : 2205170222
 Tempat / Tgl.Lahir : Sibolga, 20 Agustus 2004
 Alamat Rumah : Jln. Thamrin No.2
 Judul Proposal : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Tenuannya dijelaskan.</i>
Bab II	<i>Kapikan penulisan.</i>
Bab III	<i>indikator, waktu dan tempat disesuaikan.</i>
Lainnya	<i>Kata pengantar perbaikan.</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 19 Desember 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing

Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 19 Desember 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Fadhillah Nasution
NPM : 2205170222
Tempat / Tgl.Lahir : Sibolga, 20 Agustus 2004
Alamat Rumah : Jln. Thamrin No.2
Judul Proposal : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D*

Medan, 19 Desember 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Secretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing

Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si

NIDN : 0105087601

15/12/2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Nurul Fadhillah Nasution
 NPM : 2205170222
 Tempat dan Tanggal Lahir : Sibolga, 20 Agustus 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Anak Ke : 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara
 Alamat : Jl. Thamrin No.2
 No. Telephone : 0813-6166-4500
 Email : nurulfadhillahnasution@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Cholit Mansyur Nasution, ST
 Pekerjaan : PNS / ASN (Almarhum)
 Nama Ibu : Roiyah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Thamrin N0.2
 No. Telephone : 081264137300 (ayah)
 Email : cholitm5@gmail.com

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 101900 Lubuk Pakam
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 4 Lubuk Pakam
 Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 2 Lubuk Pakam
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara